



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor**

TESIS

**TRIANE WIDYA ANGGRIANI
1106114781**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
DESEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen,
Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi**

**TRIANE WIDYA ANGGRIANI
1106114781**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
DESEMBER 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 5 Desember 2012



(Triane Widya Anggriani)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

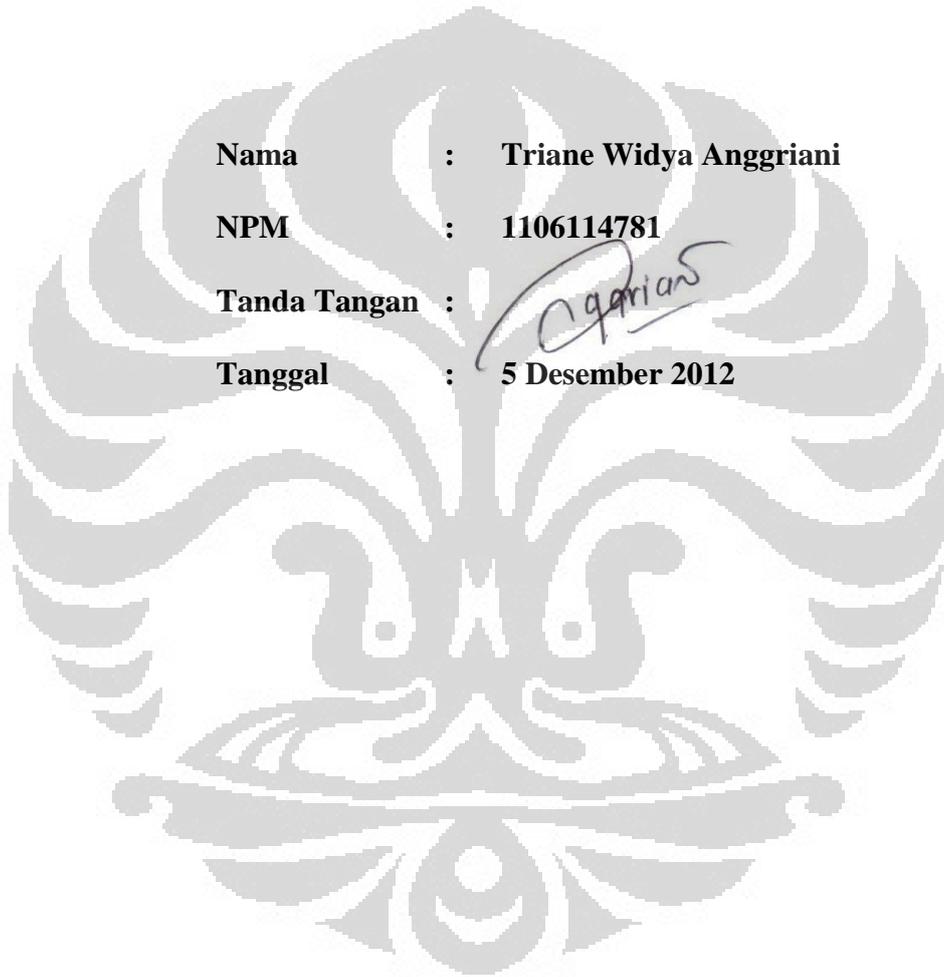
Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Triane Widya Anggriani

NPM : 1106114781

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Desember 2012



HALAMAN PENGESAHAN

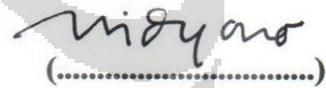
Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Triane Widya Anggriani
NPM : 1106114781
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ir. Widyono Soetjipto M.Sc.


(.....)

Penguji : Dr. Andi Fahmi Lubis


(.....)

Penguji : Nurkholis, M.SE.


(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

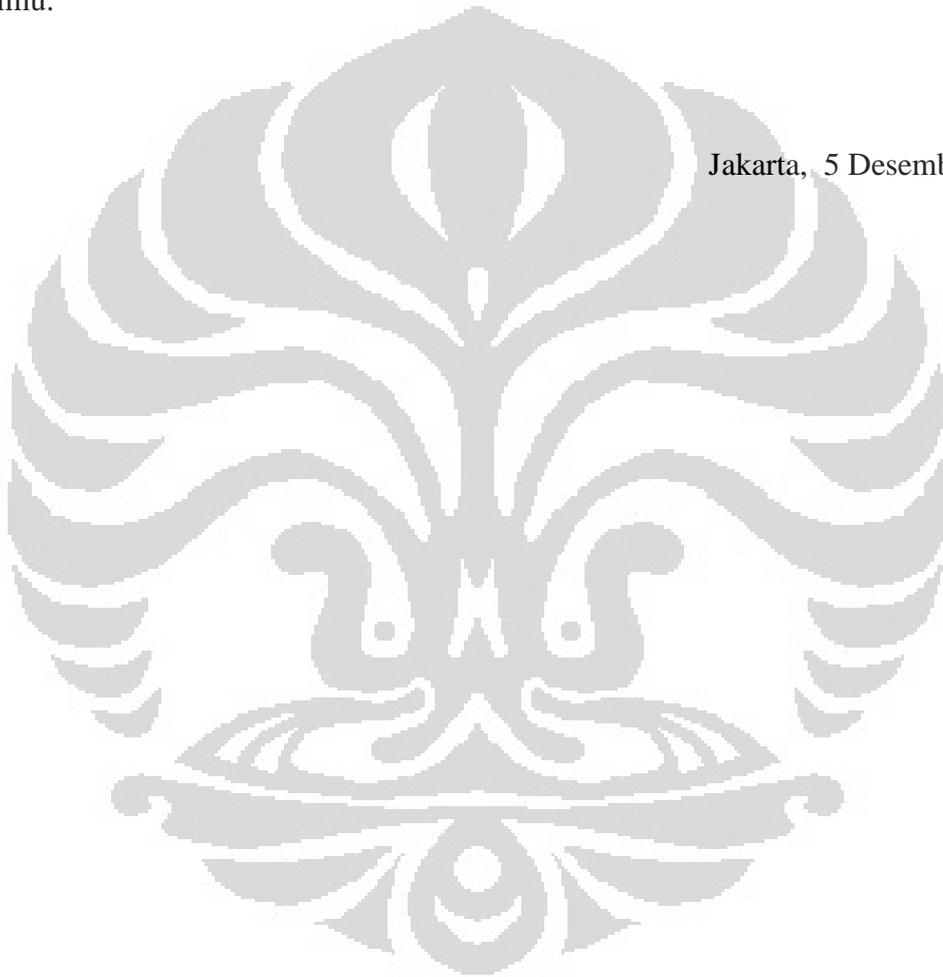
1. Pusbindiklatren Bappenas, selaku instansi yang memberikan beasiswa bagi saya untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
2. Kementerian Pertanian c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang telah memberikan ijin dan dukungan kepada saya untuk menempuh studi di MPKP UI serta Pimpinan dan jajaran Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, tempat dimana saya bertugas, yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan bantuan moril selama saya menjalani studi;
3. Dr. Ir. Widyono Soetjipto M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
4. Pengurus Gapoktan Rukun Tani yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian, memberikan informasi, masukan, dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini;
5. Seluruh Sivitas Akademika Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan studi dan penyusunan tesis ini;
6. Teman-teman angkatan XXV Bappenas atas kerjasama, dukungan dan bantuan, sehingga saya dapat menjalani masa perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini dengan baik;

7. M. Ali Husni dan Fatih Paramadina, suami dan anak saya, atas pengertian, dukungan dan doa selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini;
8. Orang tua, keluarga besar dan sahabat-sahabat yang telah memberikan doa dan dukungan bagi saya dalam menjalani perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 5 Desember 2012

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Triane Widya Anggriani
NPM : 1106114781
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

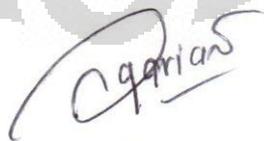
Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani, Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 November 2012

Yang Menyatakan



(Triane Widya Anggriani)

ABSTRAK

Nama : Triane Widya Anggriani
Program Studi : Magister Perencanaan dan kebijakan Publik
Judul : Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor. Program PUAP berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan program tersebut terhadap penerima dana PUAP dengan evaluasi yang dianalisis adalah : (1) mengetahui gambaran pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani, (2) menganalisis kinerja Gapoktan Rukun Tani, dan (3) menganalisis dampak pelaksanaan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani pengguna dana PUAP. Hasil penelitian menyarankan bahwa Program PUAP layak dipertahankan karena dalam pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu perlu diaktifkannya peran penyuluh pendamping gapoktan, karena pengurus gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal administrasi maupun dalam hal budidaya usaha tani tanaman pangan dan hortikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Analisis Dampak, PUAP.

ABSTRACT

Name : Triane Widya Anggriani
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Analysis Evaluation of Implementation of the Rural Agribusiness Development Program (Case Study : Gapoktan Rukun Tani, District Ciawi - Bogor)

The Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is one of important program of Ministry of Agriculture to reduce poverty and job creation. It is also intended to reduce assymetric development between urban and rural along with subsectoral gap by providing capital assistance to farmers, farm laborers, and farm households channeled through the Joint Farmers Group (Gapoktan) as farmers institution who implement PUAP program. This study aimed to analysis the impact of the program on PUAP participants. The evaluation consists of (1) understanding the implementation PUAP Program in Gapoktan Rukun Tani, (2) analysing the performance of Gapoktan Rukun Tani, and (3) analysing the impact of PUAP Program implementation on the income of farmer's PUAP recipient. The results suggest that the The Rural Agribusiness Development Program should be maintained because it provides significant benefit to the community. Beside that, the role of facilitator of Gapoktan should be actived, because the management of gapoktan and the society still need direction to develop the business, including the administration proses and also farm crops and horticulture technological aspects to member PUAP intensively and sustainably.

Keywords : Poverty, Impact Evaluation, PUAP.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	12
2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Konsep Kemiskinan	13
2.2. Evaluasi Program	15
2.3. Pengukuran Dampak.....	20
2.4. Kinerja Gapoktan	23
2.5. Tingkat Pendapatan Petani	24
2.6. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	25
2.7. Kajian Empiris Terdahulu	28
3. METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.2. Metode Pengumpulan Data	31
3.3. Metode Pengambilan Contoh	32
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data	34
3.4.1. Metoda <i>Importance Performance Analysis</i>	35
3.4.2. <i>Impact Evaluation</i> (Evaluasi Dampak).....	38
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Karakteristik Responden	41
4.2. Gambaran Pelaksanaan Program PUAP di Gapoktan Rukun Tani	46
4.3. Analisis Kinerja Gapoktan	53
4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas	53
4.3.2. Metode <i>Importance Performance Analysis</i>	56
4.4. <i>Impact Evaluation</i> (Evaluasi Dampak).....	61

4.4.1. Uji t pada Rata-rata Pendapatan Perkapita Perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol Sebelum Periode Intervensi Program	61
4.4.2. Perhitungan Selisih Rata-rata Tingkat Pendapatan Kelompok Aksi	62
4.4.3. Perhitungan Selisih Rata-rata Tingkat Pendapatan Kelompok Kontrol	64
4.4.4. Perhitungan Dampak dengan Menggunakan Kelompok Kontrol	66
4.4.5. Uji t-Statistik	68
4.5. Keterbatasan Penelitian	70
5. KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1. Kesimpulan	71
5.2. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	1
Tabel 1.2. Distribusi Pekerja Miskin Menurut Sektor Kegiatan Ekonomi	2
Tabel 1.3. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor.....	5
Tabel 1.4. Rincian Jumlah Penerima Program PUAP Kabupaten Bogor	6
Tabel 1.5. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Citapen	7
Tabel 3.1. Penerima Dana Program PUAP Tahun 2009 di Gapoktan Rukun Tani	33
Tabel 3.2. Profil Warga Miskin Desa Cibedug Tahun 2009	34
Tabel 3.3. Skor Nilai Kepentingan dan Kepuasan	36
Tabel 3.4. Indikator yang Digunakan Dalam Pengukuran Kinerja Gapoktan Penerima PUAP	37
Tabel 3.5. Garis Kemiskinan Propinsi Jawa Barat	39
Tabel 4.1. Sebaran Responden Menurut Golongan Umur	41
Tabel 4.2. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.3. Sebaran Responden Menurut Pengalaman Usaha Bertani	43
Tabel 4.4. Sebaran Responden Menurut Luas Kepemilikan Lahan	43
Tabel 4.5. Sebaran Responden Menurut Status Kepemilikan Lahan.....	44
Tabel 4.6. Sebaran Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga	45
Tabel 4.7. Sebaran Responden Menurut Komoditas Utama Usaha	46
Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas dari Jawaban Kuesioner	54
Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas dari Jawaban Kuesioner	55
Tabel 4.10. Data Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Responden	56

Tabel 4.11. Perubahan Rata-rata Pendapatan perkapita perbulan pada Kelompok Aksi	62
Tabel 4.12. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi (Nominal)	63
Tabel 4.13. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi (Riil).....	63
Tabel 4.14. Perubahan Rata-rata Pendapatan perkapita perbulan Kelompok Kontrol.....	64
Tabel 4.15. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga Kelompok Kontrol (Nominal).....	65
Tabel 4.16. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga Kelompok Kontrol (Riil)	65
Tabel 4.17. Perbandingan Perubahan Rata-rata Pendapatan Perkapita Perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)	66
Tabel 4.18. Perbandingan Perubahan Rata-rata Pendapatan Perkapita Perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)	67
Tabel 4.19. Perbandingan Perubahan Tingkat Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol.....	67
Tabel 4.20. Uji t-Statistik Terhadap Pendapatan Perkapita Perbulan Nominal	68
Tabel 4.21. Uji t-Statistik Terhadap Pendapatan Perkapita Perbulan Riil	68
Tabel 4.22. Uji t-Statistik Terhadap Pendapatan Perkapita Perbulan Kelompok Aksi Dan Kelompok Kontrol	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Konsep Kerangka Pembangunan Integral di Pedesaan	19
Gambar 2.2. Indikator Sebelum Intervensi Program	21
Gambar 2.3. Indikator Setelah Intervensi Program	21
Gambar 2.4. Perbandingan Dengan Kontra Fakta	21
Gambar 2.5. Pengukuran Dampak dengan Kontra-Fakta	22
Gambar 3.1. Kuadran <i>Importance-Performance Analysis</i>	35
Gambar 3.2. Pengukuran Dampak dengan Kelompok Kontrol	38
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Gapoktan Rukun Tani	48
Gambar 4.2. Struktur Organisasi LKMA Gapoktan Rukun Tani	48
Gambar 4.3. Persentase Usaha Produktif yang dibiayai BLM PUAP dari Tahun 2009 –2012	52
Gambar 4.4. Pembagian Kuadran IPA Terhadap Hasil Pengukuran Kinerja	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Anggota Gapoktan Penerima Program PUAP
- Lampiran 2 Kuesioner Petani Bukan Penerima Program PUAP
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS versi 17 : Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 4 Hasil Output SPSS versi 17 : Uji t Beda Rata-rata 2 Sampel Independen (sebelum intervensi program PUAP)
- Lampiran 5 Pendapatan Per kapita Per bulan dan Status Kemiskinan Kelompok Aksi
- Lampiran 6 Pendapatan Per kapita Per bulan dan Status Kemiskinan Kelompok Kontrol
- Lampiran 7 Hasil Output SPSS versi 17 : Uji t Statistik (setelah intervensi program PUAP)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan juga memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan. Akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi. Lebih lanjut kompleksitas dari kemiskinan bukan saja berhubungan dengan pengertian dan dimensinya saja tetapi juga berkaitan dengan intervensi kebijakan yang diperlukan dalam mengentaskan masalah ini.

Berdasarkan data statistik BPS (2012) pada Tabel 1.1. jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia) dari tahun 2007 – 2011 sebagian besar tinggal di perdesaan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 37,2 juta jiwa, dimana sekitar 63,7% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utamanya berada di sektor pertanian.

Tabel 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2007	13 559.3	23 609.0	37 168.3	12,52	20,37	16,58
2008	12 768.5	22 194.8	34 963.3	11,65	18,93	15,42
2009	11 910.5	20 619.4	32 530.0	10,72	17,35	14,15
2010	11 097.80	19 925.60	31 023.40	9,87	16,56	13,33
2011	11 046.75	18 972.18	30 018.93	9,23	15,72	12,49

Sumber : BPS (2012)

Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Menurut Chatani (2011), pada tahun 2007 pekerja miskin banyak bekerja di sektor pertanian dimana sektor pertanian ini terdapat di pedesaan (60,3%) dan sektor jasa dominan terdapat di perkotaan (8,5%). Ini membuktikan bahwa masyarakat miskin tinggal di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian dan bersifat informal. Keterbatasan skill dan pengetahuan menyebabkan pekerja miskin bekerja di sektor-sektor yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Tabel 1.2. Distribusi Pekerja Miskin Menurut Sektor Kegiatan Ekonomi (2007, %)

Sektor	Kota	Desa
Pertanian	5,2	60,3
Industri	4,1	9,1
Jasa	8,5	12,7
Total	17,9	82,1

Garis Kemiskinan : 1,24\$ per hari
Sumber : Chatani (2011)

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, antara lain berupa kontribusi dalam pembentukan PDB, penyediaan pangan dan pakan, penyediaan sumber devisa, penyediaan bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, dan sumber bio-energi (Kementerian Pertanian, 2009). Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasaribu (2012) jika pemerintah berpihak pada pembangunan pertanian, ada lima (5) pendekatan stabilitas pemerintah dalam pembangunan bidang ekonomi, yaitu :

1. Meningkatkan lapangan kerja di perdesaan, untuk menghambat urbanisasi di perkotaan;
2. Menopang ketahanan pangan Indonesia dari ketergantungan impor dari negara-negara maju;
3. Mengoptimalkan sumber daya alam yang sudah ada sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa pada Indonesia sebagai negara agraris;
4. Sebagai pengendali faktor inflasi bagi ekonomi Indonesia yang bersumber dari *demand* bahan makanan;
5. Memberikan peluang bagi angkatan muda wirausaha Indonesia, untuk membuka lapangan kerja baru bagi pemuda dan pemudi generasi baru Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa institusi telah tumbuh mengakar dan berkembang secara mandiri di masyarakat, institusi ini dapat dijadikan sebagai motor dan penghela pembangunan pertanian bagi masyarakat sekitarnya. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi, dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pertanian dan perdesaan baik secara langsung maupun tidak langsung tentu saja akan berdampak pada upaya pengurangan kemiskinan (Suprpto, 2008).

Pengembangan sektor pertanian saat ini menghadapi banyak tantangan dan kendala seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia di perdesaan, makin terbatasnya sumberdaya lahan, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan. Selain itu masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait merupakan hambatan di dalam pembangunan pertanian (Akbar, 2011).

Dari begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh petani, masalah sumberdaya manusia, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, serta masalah pembiayaan dan modal pertanian merupakan masalah klasik bagi pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan

pertanian terkait dengan kondisi lemahnya sistem organisasi petani dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis, dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kebutuhan petani yang sebenarnya.

Kemampuan petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan sangat terbatas karena lembaga perbankan menerapkan prinsip 5C (*Capital, Condition, Capacity, Character, dan Collateral*) dalam menilai usaha pertanian, dimana tidak semua persyaratan yang diminta tersebut dapat dipenuhi oleh petani. Sektor pertanian masih dianggap sebagai usaha yang beresiko tinggi, sedangkan skim kredit masih terbatas untuk usaha produksi, belum menyentuh kegiatan pra dan pasca produksi dan sampai saat ini belum ada lembaga penjamin dan lembaga keuangan khusus yang menangani sektor pertanian (Syahyuti, 2007).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program terobosan dari Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dimulai sejak tahun 2008 yaitu berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani atau peternak, pemilik dan atau petani penggarap skala kecil, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP.

Keberlanjutan program PUAP ditentukan oleh unsur yang terdapat dalam Gapoktan. Dengan peningkatan peran strategis Gapoktan sebagai kelembagaan tani pelaksana PUAP, maka diharapkan petani mampu meningkatkan kualitas kehidupannya melalui usaha-usaha pengembangan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia (petani), meningkatkan skala usaha dan menciptakan efisiensi dalam kegiatannya, yang pada gilirannya mampu meningkatkan produktivitasnya.

Pembangunan perdesaan di daerah adalah salah satu misi pembangunan daerah yang memberikan penekanan pada pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu misi pembangunan Kabupaten Bogor adalah meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dengan titik berat pada revitalisasi pertanian dan pembangunan

yang berbasis perdesaan. Produk unggulan yang diprioritaskan oleh Kabupaten Bogor adalah tanaman pangan dan sayuran/hortikultura (Bappeda, 2011).

Kabupaten Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Jawa Barat. Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 (SP2000) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 3,5 juta jiwa. Sedangkan tahun 2010 jumlahnya naik mencapai 4,7 juta jiwa, dengan demikian selama kurun waktu 10 tahun menunjukkan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 3,15%. Artinya penambahan penduduk di Kabupaten Bogor setiap tahun meningkat sebesar 3,15% (BPS, 2011).

Laju Pertumbuhan Penduduk yang pesat ini sayangnya tidak diimbangi dengan pembentukan modal yang besar sehingga memunculkan masalah kemiskinan di Kabupaten Bogor. Dari data Badan Pusat Statistik (2011), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2007 sebanyak 519,50 ribu jiwa atau 13,10% dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2011, jumlahnya turun menjadi 464,36 ribu jiwa atau 9,42% dari total penduduk. Namun seperti tampak pada Tabel 1.4. jumlah penduduk miskin yang terentaskan kian sedikit. Dari tahun 2008-2009 angka kemiskinan berkurang 28 ribu – 45 ribu jiwa per tahun. Sementara tahun 2010 angka kemiskinan justru bertambah 31 ribu jiwa, dan tahun 2011 hanya berkurang 11 ribu jiwa. Tabel 1.3. memperlihatkan pengentasan orang miskin makin melambat di Kabupaten Bogor.

Tabel 1.3. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor

Tahun	Kemiskinan (ribu jiwa)	Persentase	Penurunan kemiskinan (ribu jiwa)	Penurunan kemiskinan (%)
2007	519,50	13,10	-	-
2008	491,40	12,11	28,10	0,99
2009	446,04	10,81	45,36	1,30
2010	477,10	9,97	-31,06	0,84
2011	464,36	9,42	12,74	0,55

Sumber : BPS Kabupaten Bogor (2011)

Selama ini, pemerintah Kabupaten Bogor telah berupaya melakukan program pengentasan kemiskinan baik dengan program turunan pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Program Usaha Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) atau program mandiri pemerintah daerah seperti Pemuda Pelopor Desa dan Program Gerakan Pemberdayaan Inisiatif Masyarakat. Hanya saja, pada tataran implementasi belum terlihat kerja yang optimal dalam upaya menuju Kabupaten Bogor yang bebas kemiskinan. Sehingga diperlukan evaluasi apakah dalam pelaksanaannya program pemerintah tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan.

Kabupaten Bogor telah melaksanakan kegiatan Program PUAP dari tahun 2008, dengan jumlah gapoktan penerima program PUAP dari tahun 2008 sampai dengan 2011 sebanyak 121 gapoktan yang tersebar di 34 kecamatan, dimana masing-masing gapoktan menerima pinjaman bergulir sebanyak 100 juta rupiah. Total dana PUAP Kabupaten Bogor dari Tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp. 12,1 milyar. Rincian jumlah penerima Program PUAP di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4. Rincian Jumlah Penerima Program PUAP Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah			Dana PUAP (Rp. Milyar)
	Kecamatan	Desa	Gapoktan	
2008	11	25	25	2,5
2009	13	23	23	2,3
2010	17	27	27	2,7
2011	26	46	46	4,6
Total				12,1

Sumber : BP4K Kabupaten Bogor (2012)

Dana PUAP untuk program penanggulangan kemiskinan meningkat setiap tahunnya. Kian besarnya volume bantuan dana PUAP setiap tahun ternyata berbanding terbalik dengan penurunan warga miskin. Hal ini menunjukkan program penanggulangan kemiskinan belum maksimal, sehingga perlu dievaluasi sejauh mana dampak pelaksanaan program PUAP tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan.

Salah satu gapoktan di Kabupaten Bogor yang memperoleh program PUAP adalah Gapoktan Rukun Tani yang bertempat di Desa Citapen, Kecamatan Ciawi. Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, kecamatan Ciawi masuk dalam penerima program PUAP dikarenakan masih banyaknya warga miskin dan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah buruh dan petani. Desa Citapen adalah salah satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Ciawi yang berpotensi di bidang pertanian.

Berdasarkan data pada Tabel 1.5 wilayah persawahan di Desa Citapen memiliki nilai presentasi yang terbesar dibanding wilayah lainnya yaitu 54,9% dari total luas wilayah Desa Citapen. Besarnya angka dalam penggunaan lahan persawahan mengindikasikan atau menunjukkan bahwa usaha pertanian di Desa Citapen berpotensi untuk dikembangkan, termasuk usahatani tanaman pangan dan sayuran.

Tabel 1.5. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Citapen

Wilayah	Luas (ha/m ²)	Presentase (%)
Luas Tanah Sawah	140	54,9
Permukiman	110,366	43,3
Perkantoran	0,040	0,03
Pasar	-	-
Kawasan Industri	-	-
Sarana Pendidikan	0,250	0,10
Sarana Olahraga	1,2	0,47
Lahan Sawah	0,25	0,10
Kebun	2,804	1,10
Total Luas	254,91	100,00

Sumber : Data Potensi Desa Citapen (2010).

Sejak pelaksanaan kegiatan Program PUAP tahun 2008 belum pernah dilakukan evaluasi dampak terhadap peningkatan pendapatan petani miskin penerima manfaat, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai pelaksana Program PUAP di Kabupaten Bogor, pemerintah pusat ataupun pihak lainnya. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program PUAP di Kabupaten Bogor harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai. Dengan demikian penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia.

1.2. Perumusan Masalah

Penurunan kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami pelambatan. Dari tahun 2008-2009 angka kemiskinan berkurang 28 ribu – 45 ribu jiwa per tahun atau turun sebesar 0,99% – 1,30 %. Sementara tahun 2010 angka kemiskinan justru bertambah 31 ribu jiwa (naik sebesar 0,84%), dan tahun 2011 hanya berkurang 11 ribu jiwa (turun sebesar 0,55%). Oleh karena itu diperlukan evaluasi dampak pelaksanaan program pemerintah tersebut bisa mengurangi angka kemiskinan.

PUAP merupakan program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, dimana menurut data BPS penduduk miskin sebagian besar berada di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu penting untuk melihat sejauhmana dampak program PUAP di pedesaan. Sejak pelaksanaan kegiatan Program PUAP tahun 2008 belum pernah dilakukan evaluasi dampak terhadap peningkatan pendapatan petani miskin penerima manfaat, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai pelaksana Program PUAP di Kabupaten Bogor, pemerintah pusat ataupun pihak lainnya. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program PUAP di Kabupaten Bogor harus dilakukan untuk mengetahui sejauhmana indikator keberhasilan program tercapai, sehingga penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia.

Berhasil tidaknya suatu program pemerintah tentunya harus dilihat terlebih dahulu bagaimana proses pelaksanaan program tersebut dijalankan. Apakah sesuai atau tidak dengan perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah didalam melaksanakan suatu program. Untuk itu di dalam evaluasi dampak pelaksanaan program PUAP perlu dilihat bagaimana gambaran pelaksanaan program PUAP di gapoktan penerima PUAP.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Pasaribu dkk, 2012). Kinerja gapoktan penerima BLM PUAP harus menunjukkan bahwa lembaga ini mampu mengelola dan mengembangkan usahataniya menjadi lembaga ekonomi yang melayani pembiayaan bagi petani

anggota secara berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kinerja gapoktan dari sisi pengguna dana PUAP, karena pengguna dana PUAP lebih mampu menyuarakan pendapatnya, sehingga akan terjadi perbaikan kinerja ke depannya. Selain itu untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, karena lemahnya akses petani terhadap modal finansial merupakan salah satu tujuan program PUAP yang akan ditingkatkan peran gapoktan di dalam meningkatkan perekonomian di pedesaan. Untuk itu perlu mengetahui bagaimana kinerja gapoktan menurut penerima dana PUAP.

Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program (Suryahadi, 2007). Pendekatan untuk menghitung dampak terhadap pelaksanaan program PUAP adalah dengan menghitung seberapa besar peningkatan pendapatan petani. Hal ini dikarenakan :

1. Pendapatan petani merupakan salah satu indikator keberhasilan/dampak program PUAP dan salah satu indikator keberhasilan yang bisa diukur.
2. Mata pencaharian responden adalah pertanian, yaitu petani tanaman sayuran dan tanaman pangan.
3. Petani lebih banyak mengetahui penerimaan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha taninya.
4. Pendapatan yang diterima petani miskin sebagian besar biasanya akan digunakan untuk keperluan konsumsi.

Perhitungan dampak peningkatan pendapatan bagi petani miskin perlu dilakukan karena tujuan utama dari Program PUAP adalah untuk mengurangi kemiskinan, selain itu pemberian subsidi modal usaha bagi petani miskin diharapkan akan memberikan efek multiplier yang lebih besar. Sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan akan cepat tercapai. Pendapatan petani bisa dihitung berdasarkan analisis usahatani. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sejauhmana dampak kegiatan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan anggota Gapoktan (rumah tangga petani miskin).

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui gambaran pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani;
2. Menganalisis kinerja Gapoktan Rukun Tani menurut penerima dana PUAP;
3. Menganalisis dampak kegiatan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani anggota gapoktan;

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Pertanian terutama mengenai dampak kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PUAP terhadap tingkat pendapatan petani penerima manfaat.
2. Masukan bagi para pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian Pertanian dalam menentukan langkah dan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan perdesaan;
3. Bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang program PUAP.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, penelitian ini dibatasi pada evaluasi kinerja Gapoktan dan peningkatan pendapatan terhadap penerima program PUAP karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Penulis juga membatasi daerah penelitian di salah satu Gapoktan penerima dana BLM Program PUAP di Kabupaten Bogor yaitu Gapoktan Rukun Tani yang bertempat di Desa Citapen Kecamatan Ciawi.

Pemilihan Gapoktan Rukun Tani sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Gapoktan PUAP sudah terbentuk sejak awal dimulainya program PUAP sebagai lembaga otonom dari unit usaha Gapoktan penerima bantuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP. Gapoktan Rukun Tani merupakan gapoktan yang sudah lama berdiri di antara rata-rata gapoktan lainnya.
2. Kelengkapan administrasi juga merupakan salah satu penilaian didalam menentukan gapoktan yang dipilih untuk penelitian.
3. Jumlah anggota penerima dana bantuan Program PUAP Gapoktan Rukun Tani adalah terbanyak di Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 236 orang.
4. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Citapen adalah buruh dan petani dengan jumlah warga miskinnya hampir merata.

1.6. Metodologi Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengelolaan dana PUAP di Gapoktan Rukun Tani. Penilaian kinerja Gapoktan PUAP dianalisis dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis*. Pengukuran faktor dilakukan dengan membandingkan antara tingkat kepentingan petani sebagai penerima program PUAP dan tingkat kinerja gapoktan yang dirasakan oleh petani penerima. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kemandirian petani anggota PUAP didalam pengembangan kelembagaan petani di gapoktan rukun tani dimana kemandirian lembaga petani di pedesaan merupakan salah satu tujuan utama diadakannya program PUAP.

Metodologi penelitian yang digunakan untuk evaluasi dampak pelaksanaan program PUAP terhadap pendapatan anggota (petani) Gapoktan PUAP adalah metode statistik deskriptif dengan pendekatan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Yaitu menghitung perubahan tingkat pendapatan penerima bantuan dana Program PUAP pada tahun 2009 (Kelompok Aksi) sebelum intervensi program (*baseline*) dan setelah adanya intervensi, yaitu tahun 2012 (*impact*). Untuk mengetahui bahwa dampak yang ada ditimbulkan dari kegiatan

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program PUAP dilakukan proses *netting-out* dengan membentuk Kelompok Kontrol yaitu rumah tangga dengan karakteristik kemiskinan yang sama namun tidak mendapat intervensi program. Sama halnya dengan Kelompok Aksi, pada Kelompok Kontrol juga dilakukan perhitungan perubahan tingkat pendapatan sebelum dan setelah intervensi program. Kemudian perubahan pendapatan pada Kelompok Aksi dibandingkan dengan Kelompok Kontrol sehingga diperoleh besar dampak yang ditimbulkan dari kegiatan BLM Program PUAP.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap isi tesis, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis dengan menguraikan isi pokok bab dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Bab 1 merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang isinya menjelaskan pijakan teori apa yang digunakan dalam penelitian ini. Selain pijakan teori, juga ditampilkan kajian empiris sebelumnya mengenai evaluasi dampak program-program bantuan dana bergulir di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan untuk melihat aspek mana yang telah dan belum dikaji oleh peneliti sebelumnya.

Bab 3 merupakan metodologi penelitian yang menjelaskan metode apa yang digunakan, data dan alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini. Bab 4 merupakan analisis tentang pelaksanaan program PUAP, kinerja gapoktan dan analisis dampak pelaksanaan program PUAP. Terakhir Bab 5 merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemiskinan

Definisi umum kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (BPS, 2011).

Kemiskinan merupakan konsep yang multidimensional. Menurut Ellis (1998) dalam Mahaga (2009) dimensi kemiskinan menyangkut berbagai aspek, diantaranya adalah ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (*wealth*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Ada tiga pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan akses terhadap kekuasaan ini, yaitu (a) bagaimana orang dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat, (b) bagaimana orang dapat turut ambil bagian dalam pembuatan keputusan penggunaan sumber daya yang tersedia, dan (c) bagaimana kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang

mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki (Bappenas, 2004).

Dari beberapa definisi kemiskinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dimensi yang luas, tidak terbatas pada kemiskinan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya), tetapi kemiskinan juga mencakup aspek sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan berarti tidak tercapainya standar hidup yang layak.

Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan terjadi karena persoalan aksesibilitas (Ismawan, 2003). Akibat keterbatasan dan ketertidaan akses maka manusia menghadapi keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian penduduk miskin mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi penduduk miskin untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

Menurut Wedar (2011) penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*The vicious cycle of poverty*). Adanya keterbelakangan sumberdaya manusia (produktivitas), kurangnya modal, dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan penduduk miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang nantinya akan berakibat pada kurangnya modal, dan begitu seterusnya.

Pengukuran tingkat kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah didasarkan pada kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk seseorang. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara yang dengan 2.100 kilo kalori per hari) dan non makanan (sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Ruslan (2011), Bank Dunia juga menggunakan data kebutuhan dasar untuk menghitung angka kemiskinan. Konsep yang digunakan oleh Bank Dunia pada dasarnya sama dengan yang digunakan BPS, yang membedakan keduanya adalah garis kemiskinan yang digunakan. Garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia dalam dollar PPP (*Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli*). Dalam prakteknya, ada dua ukuran yang digunakan yakni 1,25 dollar dan 2 dollar. Dollar PPP atau biasa disebut dollar internasional tidak sama dengan *dollar currency* (dollar AS). Penggunaan garis kemiskinan dalam dollar PPP oleh Bank Dunia erat kaitannya dengan evaluasi pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs), yang salah satu sarannya adalah mengurangi angka kemiskinan dunia hingga tinggal setengahnya pada tahun 2015. Karena Bank Dunia membutuhkan data kemiskinan yang *comparable* (dapat diperbandingkan) antar negara, maka digunakanlah garis kemiskinan dalam dollar internasional atau dollar PPP.

2.2. Evaluasi Program

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suharyadi, 2007). Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (*outcomes*) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah

perubahan tersebut disebabkan oleh program. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengkaji apakah suatu program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, masyarakat, dan kelembagaan.

Kegiatan evaluasi dalam pengembangan program PUAP merupakan proses untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan, membantu dalam sistem perencanaan, penyusunan program dan sistem pengambilan keputusan yang bersifat antisipatif, sehingga di masa depan dapat dikembangkan program PUAP yang progresif dan dinamis (Pasaribu dkk, 2011).

Evaluasi menurut Suryahadi (2007) terbagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Menurut waktu pelaksanaan :
 - a. Evaluasi Formatif, yaitu dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program, bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
 - b. Evaluasi Summatif, yaitu dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan capaian dalam pelaksanaan program.
2. Menurut Tujuan
 - a. Evaluasi proses : bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
 - b. Evaluasi biaya-manfaat : mengkaji biaya program relatif terhadap penggunaan sumberdaya dan manfaat program.
 - c. Evaluasi dampak : apakah program dapat memberikan pengaruh yang diinginkan.

Menurut Gardiner dkk (2007), setiap jenis kebijakan termasuk diantaranya kebijakan Pro-Miskin membutuhkan pengawasan terhadapnya. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, penilaian dan analisa dampak. Pemantauan dan penilaian dilakukan terhadap satu kebijakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yang masing-masing menjadi indikator dalam proses pemantauan dan penilaian.

Pertama *Output*, yakni alat pemantauan, merupakan target antara yang menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Misalnya dalam

kebijakan peningkatan akses pendidikan output yang diharapkan adalah bertambahnya jumlah sekolah.

Kedua *Outcome*, yakni alat dalam penilaian atau evaluasi, merupakan target hasil dari tujuan antara - output - yang juga merupakan tujuan kebijakan itu sendiri (menunjukkan efektifitas kebijakan tersebut). Misalnya dalam kebijakan peningkatan akses pendidikan, outcome yang diharapkan dari bertambahnya jumlah sekolah adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik pada akses terhadap pendidikan.

Gardiner dkk (2007) menekankan bahwa evaluasi berbeda dengan monitoring. Kunci utama perbedaan antara keduanya adalah evaluasi menekankan pada penelusuran penyebab hasil (*outcomes*) sedangkan monitoring menekankan pada penelusuran terhadap progress implementasi dan proses-prosesnya, untuk meyakinkan bahwa target yang telah disepakati tercapai.

Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa tahap pekerjaan yang perlu dilakukan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang efektif, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan ini dilaksanakan dengan benar (Suryahadi, 2007). Tahapan proses evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan evaluasi. Sebuah evaluasi perlu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam penyusunan desain evaluasi yang sesuai. Dalam menentukan tujuan evaluasi, perlu mempertimbangkan berbagai konteks yang relevan, baik berkaitan dengan tujuan program itu sendiri maupun tujuan kebijakan yang lebih luas.
2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah: (a) menentukan indikator dan tolak ukur yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengukur keberhasilan program; (b) menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam evaluasi dan kebutuhan data, termasuk cara pengumpulannya; (c) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi; dan (d) menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi.
3. Mendiskusikan rencana evaluasi. Pihak-pihak yang pertama kali perlu diajak berdiskusi mengenai rencana evaluasi adalah penyandang dana program dan pelaksana program. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar dapat membantu

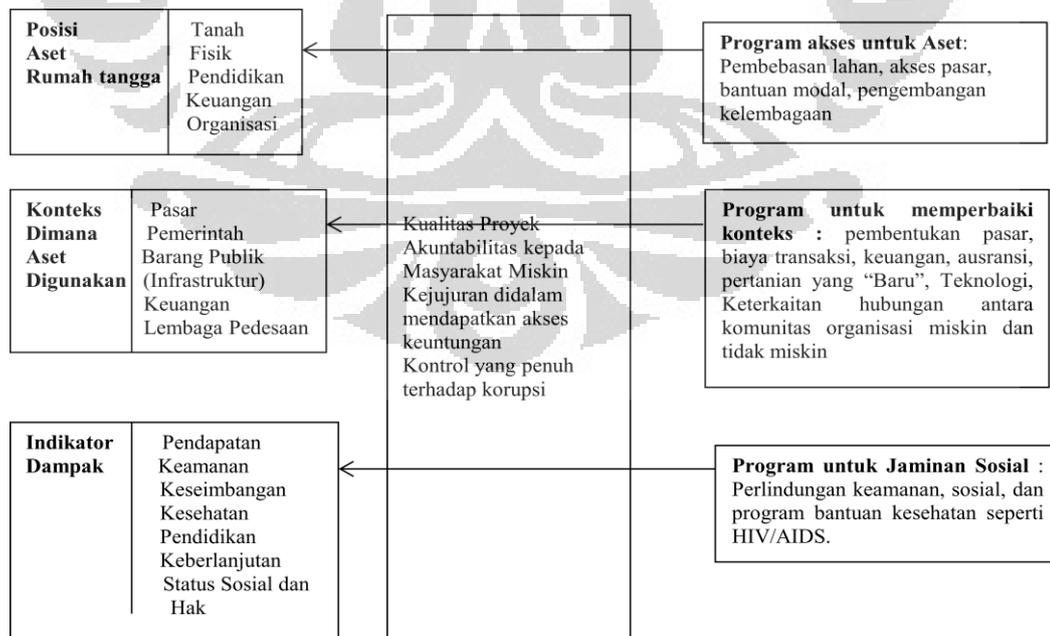
pelaksanaan evaluasi dan tidak justru sebaliknya menghambat kegiatan ini. Di samping itu perlu juga mendiskusikan rencana evaluasi, terutama rencana desain evaluasi, dengan ahli evaluasi yang berkompeten untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari rencana desain evaluasi yang telah disusun.

4. Menentukan pelaku evaluasi. Setelah rencana evaluasi mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, langkah selanjutnya adalah memilih orang atau lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Pelaku evaluasi dari bersifat internal, yaitu berasal dari pelaksana program sendiri, ataupun eksternal, yaitu pihak luar atau independen.
5. Melaksanakan evaluasi. Kegiatan inti dalam evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan evaluasi. Oleh karena itu, pengawasan kualitas data dan analisis sangat krusial untuk memperoleh kualitas evaluasi yang baik. Dalam penulisan laporan, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah agar dihasilkan suatu laporan evaluasi yang baik, baik dilihat dari segi substansi maupun tata bahasa.
6. Mendiseminasikan hasil evaluasi. Laporan evaluasi umumnya bersifat teknis, sehingga mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Agar hasil evaluasi dapat digunakan seoptimal mungkin, perlu dibuat versi ringkas dari laporan yang berfokus pada temuan utama dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umum.
7. Menggunakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi berupa tuntutan perubahan, baik dalam pelaksanaan atau bahkan dalam desain program. Perubahan yang disarankan adalah untuk membuat program menjadi lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Lebih dari itu, hasil evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi pelaksana program secara keseluruhan agar pelaksanaan program-program di masa depan dapat menjadi lebih baik. Pembelajaran dari hasil evaluasi juga akan sangat berguna bagi penyusunan program atau kebijakan baru.

Evaluasi program menurut Nuryana (2012) mendefinisikan sebagai sebuah studi sistematis untuk menguji bagaimana sebuah program bekerja dengan baik, yang secara tipikal fokus pada pencapaian tujuan program. Bisa juga dikatakan bahwa evaluasi program adalah sebuah pengujian melalui pengukuran objektif dan analisis sistematis terhadap cara-cara dan sejauhmana program itu mencapai tujuan yang direncanakan.

PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di pedesaan. Pelaksanaan program PUAP terkait banyaknya masyarakat miskin tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya modal membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan modal usaha melalui program PUAP.

Menurut Janvry (2004) pembangunan pedesaan secara menyeluruh harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu posisi aset rumah tangga miskin, keadaan dimana aset digunakan, dan indikator outcome yang ingin dicapai. Secara sederhana, konsep kerangka pembangunan integral di pedesaan dapat dijelaskan pada Gambar 2.1. berikut ini.



Gambar 2.1. Konsep Kerangka Pembangunan Integral di Pedesaan

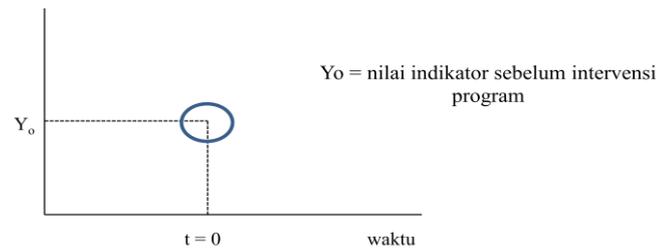
Sumber : Telah diolah kembali dari Janvry (2004).

Intervensi pemerintah di dalam pembuatan desain program penanggulangan kemiskinan harus dilihat dari beberapa aspek. Janvry (2004) menyatakan bahwa intervensi pemerintah di dalam pembangunan integral di pedesaan meliputi tiga program yakni program untuk akses kepada kepemilikan aset, program untuk memperbaiki keadaan, dan program untuk proteksi sosial.

Program untuk akses kepemilikan aset bagi masyarakat miskin bisa dilakukan dengan pembebasan lahan, akses kepada pasar, dan bantuan langsung tunai untuk pengembangan usaha, serta adanya promosi bagi lembaga di pedesaan. Program untuk memperbaiki keadaan bisa dilakukan pemerintah dengan menciptakan pasar bagi pertanian dengan mengurangi adanya biaya transaksi, dukungan keuangan dan asuransi, penciptaan pertanian yang baru dengan penggunaan teknologi, adanya kerjasama antara masyarakat miskin dengan masyarakat tidak miskin, dan juga dukungan organisasi-organisasi di masyarakat. Dan program untuk proteksi sosial bisa dilakukan dengan jaminan keselamatan, keamanan sosial dan program transfer seperti HIV/AIDS. Proses pelaksanaan program dalam pembangunan di pedesaan tersebut harus memperhatikan aspek-aspek berikut ini : 1) kualitas pelaksanaan proyek, 2) adanya akuntabilitas kepada rakyat miskin, 3) kemudahan akses mendapatkan manfaat proyek, dan 4) adanya pengawasan penuh dari tindakan korupsi.

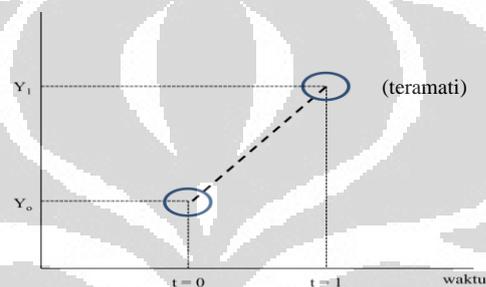
2.3. Pengukuran Dampak

Dampak adalah perbedaan antara indikator hasil dengan program dan indikator hasil tanpa program. Tetapi, sulit untuk melihat seseorang atau sesuatu dalam keadaan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Jadi, meskipun indikator hasil setelah program dapat diamati, indikator hasil tanpa program, yang biasa disebut sebagai kontra-fakta (*counter-factual*), tidak dapat diamati (Suharyadi, 2007). Ilustrasi berikut ini menggambarkan suatu indikator sebelum suatu program dijalankan.



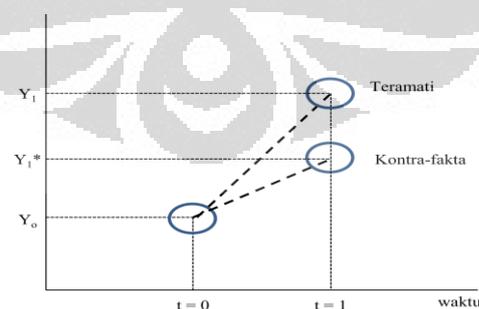
Gambar 2.2. Indikator Sebelum Intervensi Program
Sumber : Suryahadi (2007)

Setelah mendapat intervensi program, keadaan indikator program meningkat seperti gambar berikut ini.



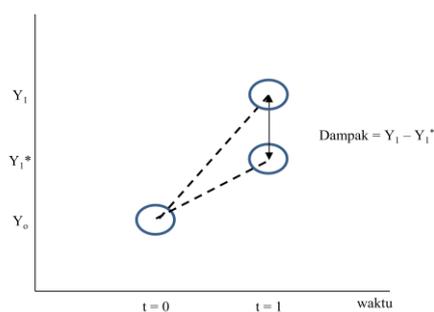
Gambar 2.3. Indikator Setelah Intervensi Program
Sumber : Suryahadi (2007)

Y_1 adalah nilai indikator setelah adanya program. Namun peningkatan ini bukan serta merta disebabkan oleh program, karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhi, baik yang teramati maupun tidak teramati. Untuk memastikan bahwa peningkatan indikator terjadi karena dampak program, diperlukan kontra-fakta yaitu nilai indikator seandainya program tidak dijalankan.



Gambar 2.4. Perbandingan dengan kontra fakta
Sumber : Suryahadi (2007)

Y_1^* adalah nilai indikator seandainya program tidak dijalankan (kontra-fakta). Sehingga dampak dihitung sebagai selisih antara Y_1 dan Y_1^* .



Gambar 2.5. Pengukuran Dampak dengan Kontra-fakta

Sumber: Suryahadi (2007)

Pengukuran kontra-fakta ini seringkali sulit dilakukan, karena tidak semata-mata membandingkan antara individu atau suatu keadaan sebelum dan sesudah intervensi program, juga tidak hanya membandingkan antara penerima manfaat dan bukan penerima manfaat program. Perbandingan semacam itu sangat bias terhadap faktor-faktor di luar program yang mungkin mempengaruhi hasil pengukuran sehingga menjadikannya tidak valid. Untuk mengukur kontra-fakta secara tepat, diperlukan proses *netting out* yaitu mencari suatu kelompok pembandingan (*control group*) yang setara dan terpercaya, yakni kelompok bukan penerima program yang memiliki karakteristik yang persis sama dengan kelompok penerima program atau kelompok aksi (*treatment group*), sebagai pembandingan (Suryahadi, 2007). Penentuan kedua kelompok ini, *control group* dan *treatment group*, merupakan kunci dalam mengidentifikasi apa yang akan terjadi bila intervensi tidak ada.

Salah satu metode yang digunakan dalam mengukur evaluasi dampak ini, adalah Selisih-dalam-selisih/Selisih ganda (*Difference-in-difference/Double difference*). Dalam metode ini data awal (*baseline*) kelompok penerima manfaat (*treatment group* atau Kelompok Aksi) dan kelompok bukan penerima manfaat (*control group*) sebelum adanya intervensi program dikumpulkan (*baseline data*). Data dikumpulkan lagi setelah adanya intervensi program. Kemudian untuk masing-masing kelompok, nilai data setelah intervensi program dikurangi dengan data awal sebelum intervensi program. Setelah itu kurangkan kedua selisih (ini asal istilah selisih-dalam-selisih). Nilai yang didapat merupakan perkiraan dampak program (Suryahadi, 2007).

2.4. Kinerja Gapoktan

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai perilaku berkarya, penampilan, atau hasil karya. Karena itu kinerja merupakan bentuk yang multidimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung dari banyak faktor (Pasaribu dkk, 2012).

Kelembagaan petani di perdesaan memiliki peran yang strategis dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal ini para petani. Kelembagaan merupakan himpunan norma-norma dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan bersosial masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat (Elizabeth dalam Akbar 2011).

Sejalan dengan format penumbuhan gapoktan menjadi kelembagaan tani di perdesaan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007, maka gapoktan penerima BLM PUAP harus menunjukkan bahwa lembaga ini mampu mengelola dan mengembangkan usahataniya menjadi lembaga ekonomi ataupun lembaga keuangan mikro agribisnis. Kemudian lembaga ini menjadi salah satu unit usaha dalam gapoktan sehingga dapat mengelola dan melayani pembiayaan bagi petani anggota secara berkelanjutan.

Pengertian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menurut Pedoman Umum PUAP (2011) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sedangkan pengertian kelompok tani sendiri yaitu kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Kementerian Pertanian, 2011).

Gapoktan diharapkan dapat berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Tujuan utama pembentukan dan pemberdayaan gapoktan adalah untuk memperkuat

kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Kementerian Pertanian, 2011).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota (Kementerian Pertanian, 2011). Dana yang dikelola LKM-A dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota. Pengukuran kinerja aspek manajemen pengelolaan LKM-A pada gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat gapoktan PUAP oleh pengurus.

2.5. Tingkat Pendapatan Petani

Dalam mengukur kondisi ekonomi seseorang atau rumah tangga, salah satu konsep yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai sisa dari pengurangan nilai penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diharapkan adalah pendapatan yang bernilai positif. Penerimaan usahatani adalah nilai produk total usahatani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Penerimaan ini mencakup semua produk yang dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, yang digunakan kembali untuk bibit atau yang disimpan di gudang (Soekarwati *et al*, 1986).

Berusahatani sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh produksi di lahan pertanian, pada akhirnya akan dinilai dari biaya yang dikeluarkan dan penerimaan yang diperoleh. Selisih keduanya merupakan pendapatan dari kegiatan usahatani. Dengan demikian pendapatan didefinisikan sebagai selisih dari total penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan di dalam usahatani (Soekartawi, 1995).

$$Pd = TR - TC$$

dimana:

Pd = Pendapatan

TR = Total Revenue (Penerimaan)

TC = Total Cost (Total biaya)

Pendapatan usaha tani tergantung pada faktor-faktor produksi, yaitu 1) penggunaan varietas unggul, 2) pemupukan yang seimbang, 3) pengolahan tanah, 4) pengairan yang baik, 5) pemberantasan hama dan penyakit, 6) penanganan pasca panen, 7) penggunaan lahan secara intensifikasi, 8) penggunaan peralatan dan mesin yang canggih dan modern, 9) peningkatan sumberdaya manusia, dan 10) penambahan modal usaha. Kesepuluh faktor produksi di atas menentukan tingkat kemiskinan petani serta usaha tani (Ginting, 2004).

2.6. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri yang melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, yang diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan penguatan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

PUAP merupakan salah satu subsidi dari pemerintah untuk rumah tangga petani miskin berupa bantuan modal usaha baik dalam bentuk barang sarana produksi pertanian maupun dalam bentuk modal keuangan. Subsidi dipandang sebagai pajak negatif (*negative tax*), karena subsidi menambah pendapatan nyata. Sebagaimana halnya pajak, manfaat pemberian subsidi terbagi-bagi antara produsen dan konsumen, tergantung elastisitas permintaan dan penawaran. Jika subsidi diberikan kepada petani, maka akan menggeser kurva penawaran ke kanan bawah. Hal ini berimplikasi kepada penurunan harga disertai penambahan output hasil pertanian. Efek positif dari pemberian subsidi adalah peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan output.

Operasional penyaluran dana PUAP dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada Gapoktan melalui PUAP dalam hal penyaluran dana penguatan modal kepada anggota. Agar mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Jumlah dana yang disalurkan ke setiap Gapoktan

maksimal sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut disalurkan ke setiap anggota Gapoktan untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Dengan demikian, Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain : memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota (Kementerian Pertanian, 2011).

Tujuan utama dari program PUAP adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.
2. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh pertanian, dan penyelia mitra tani.
3. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan agribisnis.
4. Meningkatkan fungsi kelembagaan jejaring atau mitra kelembagaan keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

Adapun sasaran yang diharapkan dari program PUAP adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya usaha agribisnis di desa miskin terjangkau sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. Berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
3. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/ peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman.

Program PUAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian sejak tahun 2008, pelaksanaannya melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut : (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP; (2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin yang terjangkau; (3) Fasilitasi modal usaha bagi petani

kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin; 4) Penguatan kelembagaan gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki petani.

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

1. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP.
2. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan program PUAP, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut. Indikator yang dimaksud adalah menilai tingkat pendapatan. Pemilihan indikator ini dengan pertimbangan bahwa pendapatan merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan seseorang.

Untuk mengantisipasi agar penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP berjalan lancar, maka dibentuklah suatu tim pemantau, pembinaan, dan

pengendalian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembinaan difokuskan terhadap peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP di tingkat kabupaten/kota; koordinasi dan pengendalian; serta mengembangkan sistem pelaporan PUAP melalui pelatihan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan PUAP di lapangan nantinya. Disamping melakukan pembinaan, pengendalian juga dilakukan oleh tim pusat PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian. Pelaksanaan pengendalian dari tim pembina PUAP provinsi hingga tim teknis PUAP kecamatan dilakukan dengan cara pertemuan reguler dan kunjungan lapangan serta mendiskusikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

2.7. Kajian Empiris Terdahulu

Beberapa studi terkait dengan evaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan pernah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh Ravallion *et al.* (2005) melakukan evaluasi dampak pelaksanaan Program Trajabar di Argentina. Penelitian ini bertujuan untuk melihat evaluasi dampak (*Impact Evaluation*) tentang manfaat yang diperoleh orang miskin dari pasar tenaga kerja. Metode yang digunakan dalam mengukur evaluasi dampak ini adalah Selisih-dalam-selisih (*Difference-in-difference*). Evaluasi dampak yang dilakukan menyangkut aspek tingkat pendapatan, tingkat partisipasi orang miskin, dan tingkat pengangguran. Langkah yang dilakukan adalah menghitung perubahan tingkat pendapatan orang miskin yang mengikuti program Trajabar sebelum intervensi program (*baseline*) dan setelah adanya intervensi. Selain itu dilakukan juga proses *netting-out* dengan membentuk Kelompok Kontrol sehingga diperoleh besar dampak yang ditimbulkan dari program tersebut.

Santosa, Hidayat dan Indroyono (2003) pendekatan penelitian evaluasi dampak yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode ESCAP (*Economic and Social Commission for Asian and Pacific*) yakni dengan menilai beberapa indikator seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, efisiensi penyaluran program dan kelangsungan dana. Program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi meliputi program Inpres Desa Tertinggal (IDT),

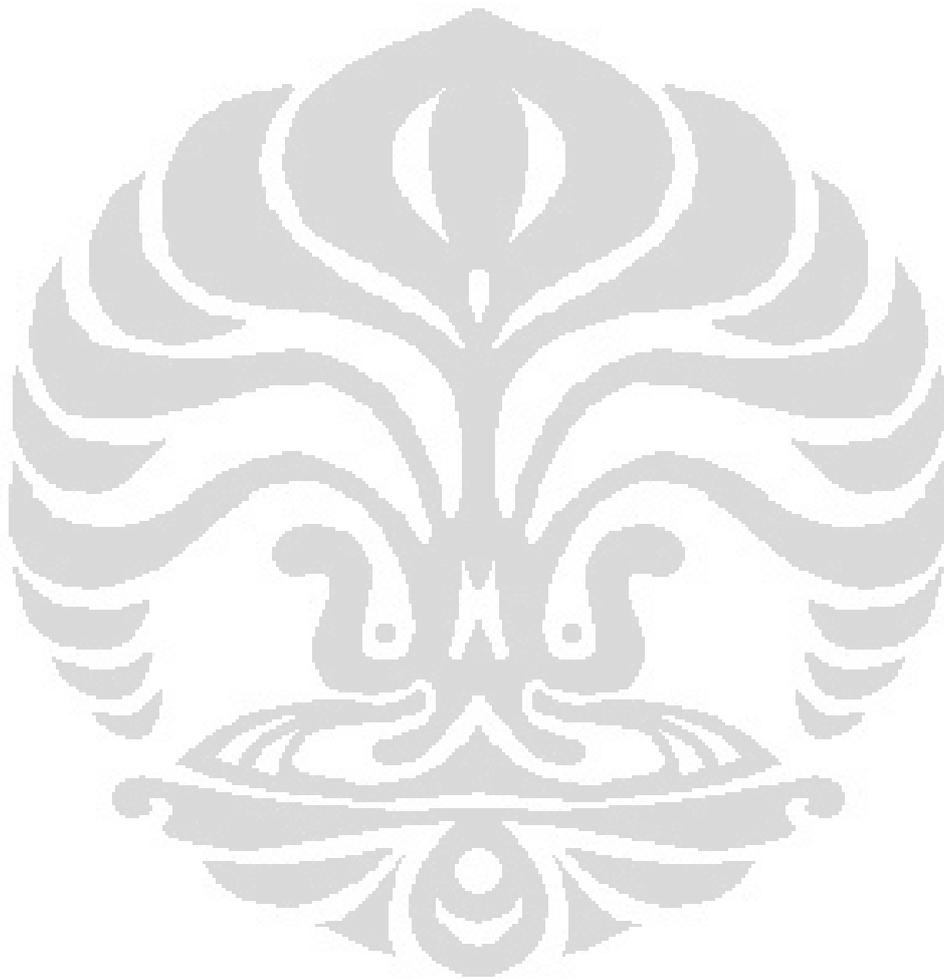
Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang ketiganya dikategorikan sebagai Program Kerja Mandiri dan Proyek Pembangunan Fisik dalam Program PPK yang dikategorikan sebagai Program Padat Karya. Hasil kesimpulan dari penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan program pinjaman bergulir lebih berhasil dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah sampel dibanding dengan program padat karya.

Chandra (2010) dan Habibillah (2010) melakukan pendekatan evaluasi dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan evaluasi kualitatif yakni mengukur penilaian baik, sedang, dan buruk dari suatu program dengan menitikberatkan pada proses pelaksanaan program mulai dari input, proses, output, outcome, dan benefit.

Caesarion (2011), melakukan penelitian mengenai efektivitas program PUAP terhadap kinerja usaha kecil dengan menggunakan metode statistik analisis regresi linier berganda. Variabel yang digunakan adalah kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan usaha tani; pengembangan agribisnis perdesaan; pengembangan usaha mikro; dan peran pendampingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah adanya bantuan program PUAP kinerja usaha kecil pertanian menjadi lebih efektif. Sedangkan Akbar (2011) melakukan penelitian mengenai Strategi Keberlanjutan Program PUAP di Kabupaten Karawang dengan menganalisis pada kinerja gapoktan penerima PUAP. Alat analisis yang digunakan adalah *Importance Performance Analysis* (IPA).

Posisi penelitian ini adalah mengacu pada Ravallion et al. (2005). Penulis membatasi evaluasi yang dianalisis pada dampak peningkatan pendapatan pengguna dana PUAP. Penulis menggunakan penghitungan dengan kelompok kontrol dengan tujuan untuk memastikan bahwa peningkatan indikator terjadi karena dampak program. Penulis juga menambahkan evaluasi terhadap kinerja gapoktan, hal ini dilakukan untuk perbaikan kinerja gapoktan kedepannya. Penulis tertarik untuk meneliti evaluasi kinerja gapoktan dan dampak pinjaman bergulir dana PUAP terhadap tingkat pendapatan petani, karena menurut penulis kinerja kelembagaan petani (gapoktan) dan tingkat pendapatan merupakan variabel yang langsung dirasakan oleh petani dan juga merupakan indikator kemajuan dan

prestasi kelompok dan masyarakat dalam kaitannya dengan program penanggulangan kemiskinan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan karena evaluasi dampak pelaksanaan program PUAP terhadap peningkatan kinerja dan tingkat pendapatan petani belum pernah dilakukan. Padahal penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai pelaksana program di daerah, juga bagi stakeholder lainnya untuk mengetahui sejauhmana indikator-indikator tujuan program dapat dicapai.



BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bogor. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan Kabupaten Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak di provinsi Jawa Barat. Penurunan kemiskinan di Kabupaten Bogor mengalami pelambatan. Dari tahun 2008-2009 angka kemiskinan berkurang 28 ribu – 45 ribu jiwa per tahun. Sementara tahun 2010 angka kemiskinan justru bertambah, dan tahun 2011 hanya berkurang 11 ribu jiwa.

Sejak pelaksanaan kegiatan Program PUAP tahun 2008 belum pernah dilakukan evaluasi dampak terhadap peningkatan pendapatan petani miskin penerima manfaat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai pelaksana Program PUAP di Kabupaten Bogor. Mengingat segala upaya yang telah dilakukan untuk program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan dana yang dialokasikan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Program PUAP di Kabupaten Bogor harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator keberhasilan program tercapai, sehingga penggunaan segala sumber daya tersebut tidak sia-sia. Pengambilan sampel dilaksanakan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2012.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder (Kuncoro, 2003). Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program PUAP dan publikasi dari berbagai lembaga pemerintah seperti Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K), Kantor Kecamatan Ciawi, Kantor Desa Citapen, Kantor Desa Cibedug, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan PUAP.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original (Kuncoro, 2003). Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang selengkapnya disajikan dalam lampiran 1 dan 2 yang ditujukan kepada kelompok masyarakat penerima manfaat (Kelompok Aksi) dan kelompok masyarakat bukan penerima manfaat (Kelompok Kontrol). Selain kuesioner, untuk memperdalam pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti, penulis juga melakukan wawancara (*interview*) pada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani, antara lain dengan: Kepala Gapoktan Rukun Tani dan pengurusnya, pendamping/penyuluh yang mendampingi gapoktan Rukun Tani, dan pengurus Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

3.3. Metode Pengambilan Contoh

Gapoktan Rukun Tani dipilih secara purposive sebagai lokasi contoh dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Keberadaan Gapoktan PUAP sudah terbentuk sejak awal dimulainya program PUAP sebagai lembaga otonom dari unit usaha Gapoktan penerima bantuan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP. Gapoktan Rukun Tani merupakan gapoktan yang sudah lama berdiri di antara rata-rata gapoktan lainnya.
2. Kelengkapan administrasi juga merupakan salah satu penilaian didalam menentukan gapoktan yang dipilih untuk penelitian.
3. Jumlah anggota penerima dana bantuan Program PUAP Gapoktan Rukun Tani adalah terbanyak di Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 236 orang.
4. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Citapen adalah buruh dan petani dengan jumlah warga miskinnya hampir merata.

Pengambilan sampel lokasi dilakukan dengan metode sensus, yaitu tiap unit populasi dihitung dalam penelitian (*complete enumeration*) (Nazir, 2009). Jumlah populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 61 petani yang terdiri dari 25 petani dari Desa Citapen (kelompok aksi) dan 36 petani dari Desa Cibedug (kelompok kontrol). Kriteria untuk kelompok aksi adalah petani

(rumah tangga miskin) yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir Program PUAP pada tahun 2009 dan tidak mendapatkan bantuan program lainnya. Dan untuk kriteria responden kelompok kontrol adalah petani (rumah tangga miskin) yang tidak mendapatkan bantuan program pemerintah.

Kelompok yang dijadikan kontrol adalah petani dari Desa Cibedug. Alasan pertimbangan pemilihan desa Cibedug sebagai kelompok kontrol adalah

1. Petani (rumah tangga miskin) yang menjadi sampel adalah petani miskin yang mempunyai tingkat kemiskinan sama dengan petani miskin penerima manfaat kegiatan pinjaman bergulir program PUAP. Kesamaan tingkat kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan per kapita per bulan pada tahun 2009 (*baseline*).
2. Karakteristik mata pencaharian masyarakat yang menjadi kelompok kontrol adalah sama dengan kelompok aksi, yaitu sebagian besar mata pencahariannya adalah pertanian, dengan luas lahan penggunaan area pertanian yang relatif sama.
3. Petani miskin kelompok kontrol tidak/belum pernah menerima program PUAP dan yang lainnya.

Tabel 3.1. Penerima Dana Program PUAP Tahun 2009 di Gapoktan Rukun Tani

Status Usaha	Tahap I	Tahap II	Total
Petani	18	10	28*
Bakulan	2	2	4
Industri RT	1	-	1
Peternak	10	-	10
Jumlah	31	12	43

Sumber : Gapoktan Rukun Tani, 2009

Setelah melihat database profil warga miskin Desa Citapen Tahun 2009, terdapat tiga orang petani tidak termasuk dalam daftar database warga miskin. Sehingga jumlah petani miskin yang menerima dana PUAP pada tahun 2009 adalah sebanyak 25 orang.

Tabel 3.2. Profil Warga Miskin Desa Cibedug Tahun 2009

Pekerjaan	RW						Total
	01	02	03	04	05	06	
Petani	3	-	2	19	3	9	36
Buruh	16	118	145	123	65	201	668
Jasa/ojeg/supir	12	-	-	9	-	-	21
Pedagang	3	4	5	8	7	33	60
Pengangguran	-	21	28	35	23	57	164
Karyawan	-	-	2	9	6	11	28
Peternak	-	-	-	3	-	-	3
Industri RT	-	-	-	1	-	-	1
Jumlah	34	143	182	207	104	311	981

Sumber : Desa Cibedug, 2009

Alasan petani miskin dijadikan sebagai responden adalah karena tujuan utama program PUAP adalah untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan, dimana sebagian besar masyarakat miskin di pedesaan adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Selain itu efek multiplier pemberian subsidi modal usaha kepada petani miskin lebih besar efek peningkatan outputnya dibandingkan dengan petani tidak miskin, mengingat petani miskin rata-rata tambahan penggunaan untuk konsumsinya lebih besar dibandingkan dengan tingkat tabungannya. Efek multiplier adalah berbanding lurus dengan *Marginal Propensity to Consume* (MPC), dimana semakin besar nilai MPC maka tambahan efek multipliernya juga semakin besar.

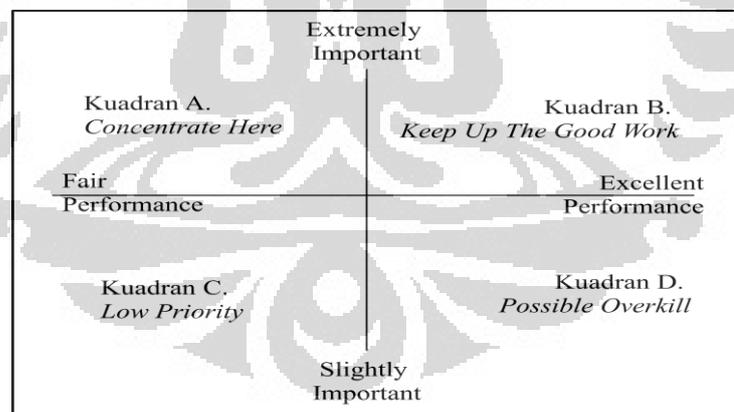
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran umum mengenai pelaksanaan pengelolaan dana PUAP di Gapoktan Rukun Tani. Penilaian kinerja Gapoktan PUAP dianalisis dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis*. Metode *impact evaluation* digunakan untuk mengetahui dampak keberhasilan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan bagi penerima bantuan dana PUAP. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis sehingga mampu memberikan gambaran dan penjelasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3.4.1. Metode *Importance Performance Analysis* (IPA)

Metode *Importance Performance Analysis* (IPA) diperkenalkan oleh Martilla dan James pada tahun 1977 untuk menunjukkan kepentingan relatif berbagai atribut terhadap kinerja organisasi atau perusahaan (Wijaya, 2011). IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja

IPA bertujuan untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan sangat memengaruhi loyalitas dan kepuasan mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan perlu ditingkatkan karena kondisi saat ini belum memuaskan pelanggan. IPA menyatukan pengukuran faktor tingkat kinerja (*performance*) dan tingkat kepentingan (*importance*) yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram *importance-performance* untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan penjelasan data. Grafik IPA dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *importance-performance* seperti yang terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kuadran *Importance-Performance Analysis*
Sumber : Martilla and James (1977)

Kuadran yang terdapat pada Gambar 3.1, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kuadran A, “*Concentrate Here*”

Menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap sangat penting, namun memperlihatkan tingkat kepuasan yang rendah menurut pelanggan.

2. Kuadran B, *“Keep up with The Good Work”*
Menunjukkan unsur pokok yang sudah ada pada produk sehingga wajib dipertahankan karena dianggap sangat penting dan memuaskan pelanggan.
3. Kuadran C, *“Low Priority”*
Menunjukkan faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi pelanggan (keberadaannya biasa-biasa saja) dan dianggap kurang memuaskan.
4. Kuadran D, *“Possible Overkill”*
Menunjukkan faktor yang menurut pelanggan kurang penting namun pelaksanaannya berlebihan. Faktor yang dianggap kurang penting tetapi kinerjanya sangat memuaskan.

Matriks di atas digunakan untuk menggambarkan prioritas atribut-atribut guna perbaikan ke depan. Skala yang digunakan adalah skala Likert, yaitu skala 1 sampai 5 dengan keterangan sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Skor Nilai Kepentingan dan Kepuasan

Skor/Nilai	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
5	Sangat Penting	Sangat Puas
4	Penting	Puas
3	Cukup Penting	Cukup Puas
2	Kurang Penting	Kurang Puas
1	Tidak Penting	Tidak Puas

Penerapan teknik *Importance-Performance Analysis* (IPA) menurut Wang and Tseng (2011) dimulai dengan identifikasi atribut-atribut yang relevan terhadap situasi pilihan yang diamati. Daftar atribut-atribut dapat dikembangkan dengan mengacu kepada literatur-literatur, melakukan interview, dan menggunakan penilaian manajerial. Di lain pihak, sekumpulan atribut yang melekat kepada barang atau jasa yang dievaluasi berdasarkan seberapa penting masing-masing produk tersebut bagi konsumen dan bagaimana barang atau jasa tersebut dipersepsikan oleh konsumen.

Tahap Kedua dilakukan penyebaran dan pengisian kuisioner oleh para petani penerima PUAP. Data hasil survei diolah untuk mendapatkan gambaran tentang kepentingan dan kepuasan terhadap kinerja gapoktan dari pihak penerima program.

Tahap ketiga, memplotkan nilai rata-rata setiap atribut kepentingan pada sumbu vertikal dan nilai rata-rata setiap atribut tingkat kepuasan pada sumbu horisontal yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram *importance-performance*, dimana pusat pemotongan garis adalah nilai rata-rata yang terdapat pada dimensi kepentingan dan kepuasan. Dan tahap terakhir adalah melakukan interpretasi dan analisis seputar indikator-indikator apa yang masuk ke dalam kategori *Concentrate Here*, *Keep Up with the Good Work*, *Low Priority*, dan *Possibly Overkill*.

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan survei ke lapangan. Pengukuran kinerja Gapoktan PUAP dapat dinilai melalui evaluasi kinerja beberapa aspek, yaitu aspek organisasi, aspek pengelolaan dana PUAP, dan aspek usaha agribisnis (Kementerian Pertanian, 2010). Selanjutnya setiap aspek tersebut diberi indikator kinerja seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Indikator yang Digunakan Dalam Pengukuran Kinerja Gapoktan PUAP

Aspek	Indikator
Aspek Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gapoktan memiliki AD/ART 2. Gapoktan melakukan pemisahan pengurus gapoktan dan pengelola LKMA 3. Gapoktan mempunyai rencana kerja 4. Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan anggota secara berkala 5. Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu 6. Gapoktan memiliki badan hukum
Aspek Pengelolaan Dana PUAP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program PUAP 2. Kemudahan persyaratan penerima PUAP 3. Waktu realisasi pinjaman 4. Pencatatan dan pembukuan 5. Analisa kelayakan usaha 6. Pelaporan yang dibuat pengurus Gapoktan 7. Pembinaan usaha anggota 8. Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan 9. Insentif dan sanksi 10. Sarana dan prasarana
Aspek Usaha Agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gapoktan mengadakan saprodi pertanian 2. Adanya peran penyuluh pendamping 3. Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan 4. Pemasaran bersama dilakukan oleh gapoktan

Sumber : Kementerian Pertanian (2010)

3.4.2. *Impact Evaluation* (Evaluasi Dampak)

Metode *impact evaluation* dilakukan pengukuran nilai indikator sebelum dan setelah intervensi program pada dua kelompok yaitu kelompok yang mendapat intervensi program (Kelompok Aksi) dan kelompok yang tidak mendapat intervensi program (Kelompok Kontrol). Indikator yang akan diukur adalah tingkat pendapatan per kapita per bulan. Indikator sebelum intervensi program adalah tingkat pendapatan per kapita per bulan pada tahun 2009 (*baseline*) dan indikator setelah intervensi program adalah tingkat pendapatan per kapita per bulan tahun 2012 (*impact*). Pada masing-masing kelompok dilakukan penghitungan selisih nilai indikator pada saat *impact* dan *baseline*. Setelah itu kurangkan kedua selisih (selisih dalam selisih), sehingga diperoleh nilai dampak yang dihasilkan dari intervensi program (Suryahadi, 2007).

Rumus penghitungan selisih dalam selisih adalah sebagai berikut :

$$\Delta Y = (Y_{A1} - Y_{A0}) - (Y_{K1} - Y_{K0})$$

dimana :

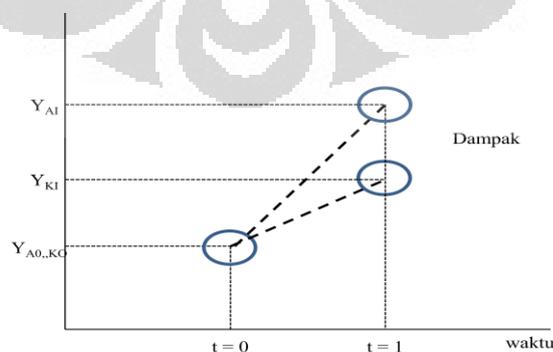
Y_{A0} = Pendapatan per kapita per bulan kelompok Aksi sebelum intervensi program

Y_{A1} = Pendapatan per kapita per bulan kelompok Aksi setelah intervensi program

Y_{K0} = Pendapatan per kapita per bulan kelompok Kontrol sebelum periode program

Y_{K1} = Pendapatan per kapita per bulan kelompok Kontrol setelah periode program

Apabila digambar, maka pengukuran dampak Pinjaman Bergulir program PUAP seperti berikut ini :



Gambar 3.2 Pengukuran Dampak dengan Kelompok Kontrol

Sumber : Suryahadi (2007).

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis dampak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan *Uji Independent Sample T Test* (Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol). Uji ini dilakukan untuk mengetahui kesamaan rata-rata tingkat pendapatan per kapita per bulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum periode intervensi program, yaitu tahun 2009 sebagai tahun *baseline*. Apabila sama, maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak sama maka dilakukan pemilihan sampel kembali sampai hasil uji T-Test menghasilkan kesamaan rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada kedua kelompok. Pengolahan data menggunakan software SPSS versi 17.
2. Melakukan penghitungan dampak dengan cara :
 - a. Menghitung selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan Kelompok Aksi sebelum dan sesudah intervensi program PUAP;
 - b. Menghitung selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan Kelompok Kontrol pada periode yang sama dengan penghitungan Kelompok Aksi;
 - c. Menghitung selisih hasil pada poin a dan b.

Adisasmita (2005) dalam Artiningtyas (2012) mengatakan bahwa kemiskinan absolut sering dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis kemiskinan.

Untuk mengukur kemiskinan, penulis mengacu pada konsep garis kemiskinan pada tahun dasar dan tahun sekarang dari Badan Pusat Statistik. Penduduk miskin adalah mereka yang pendapatan per kapitanya di bawah Garis Kemiskinan. Adapun garis kemiskinan perdesaan Propinsi Jawa Barat tahun dasar (2009) dan tahun sekarang (2012) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5. Garis Kemiskinan di Daerah Pedesaan Propinsi Jawa Barat

Tahun	2009	2012
Garis Kemiskinan (Rp.)	Rp. 175.193,-	Rp. 216.610,-

Sumber: BPS Tahun 2009 dan Tahun 2012.

Indikator pengurangan kemiskinan digunakan untuk mengukur persentase dampak perubahan jumlah penduduk miskin setelah dilaksanakan program PUAP. Perhitungan dilakukan dengan mengurangi perubahan jumlah penduduk miskin pada kelompok aksi dengan kelompok kontrol.

Untuk menguji perbedaan rata-rata tingkat pendapatan perkapita perbulan sebelum dan sesudah adanya program PUAP, akan dilakukan dengan *Uji Paired Sampel T Test* dan *Uji Independent Sample T Test*. *Uji Paired Sampel T Test* digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang nyata antara pendapatan perkapita perbulan sebelum dan sesudah PUAP baik pada kelompok aksi maupun pada kelompok kontrol. Sedangkan *Uji Independent Sample T Test* digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara pendapatan perkapita perbulan sesudah program PUAP antara kelompok aksi dan kelompok kontrol. Formulasinya sebagai berikut :

1. *Uji Paired Sampel T Test*

Uji hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

Ho : $u_1 = u_2$ (tidak ada perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan sesudah program PUAP).

H1 : $u_1 \neq u_2$ (ada perbedaan pendapatan perkapita sebelum dan sesudah program PUAP).

Kriteria Uji :

Ho ditolak jika $p \text{ value} < 0,05$ (Sulistyo, 2012).

Uji ini dilakukan pada kelompok aksi dan juga pada kelompok kontrol.

2. *Uji Independent Sample T Test*

Uji hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

Ho : $u_1 = u_2$ (tidak ada perbedaan pendapatan perkapita sesudah program PUAP antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol).

H1 : $u_1 \neq u_2$ (ada perbedaan pendapatan perkapita sesudah program PUAP kelompok aksi dengan kelompok kontrol).

Kriteria Uji :

Ho ditolak jika $p \text{ value} < 0,05$ (Sulistyo, 2012).

Analisis data akan dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 17. Hasil pengolahan data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara deskriptif.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan objek penelitian ini terbagi menjadi kelompok aksi (responden yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir PUAP) dan kelompok kontrol (responden yang belum mendapatkan pinjaman dana bergulir PUAP) di dua desa yang berbeda. Deskripsi karakteristik responden dilihat dari beberapa kriteria antara lain usia, tingkat pendidikan, lama pengalaman bertani, luas kepemilikan lahan, status kepemilikan lahan, jumlah tanggungan keluarga dan status usaha tani.

1. Usia Responden

Berdasarkan kriteria usia, responden dibagi menjadi empat kelompok usia yaitu kelompok usia 21-40 tahun, kelompok 41-60 tahun, dan kelompok usia 61-80 tahun. Sebaran responden dari masing-masing kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Sebaran Responden Menurut Golongan Umur

Usia	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
21-40	8	32	9	25
41-60	12	48	23	63,89
61-80	5	20	4	11,11
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah Diolah.

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa para responden yang melakukan kegiatan usahatani baik yang telah mendapatkan maupun yang belum mendapatkan dana BLM PUAP sebagian besar berada pada rentang usia 41 – 60 tahun yakni pada kelompok aksi sebanyak 48% dan pada kelompok kontrol sebanyak 63,89%. Namun faktor usia tidak membatasi petani untuk melakukan kegiatan usahatani, karena pada kelompok aksi dan kelompok kontrol terdapat responden yang berusia lanjut dan tergolong bukan usia produktif yang masih mampu melakukan aktifitas usahatani yakni sebesar 20% untuk kelompok aksi dan 11,11% untuk kelompok kontrol.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang banyak ditempuh oleh petani yang menjadi responden umumnya setingkat sekolah dasar (SD). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari SD masih sedikit ditempuh oleh responden, hanya sebagian kecil dari mereka yang mengenyam pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ataupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Gambaran umum tingkat pendidikan responden disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak Sekolah	4	16	11	30,56
SD	16	64	21	58,33
SLTP	3	12	2	5,56
SLTA	2	8	2	5,56
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Berdasarkan Tabel 4.2. dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden hanya memiliki jenjang pendidikan pada tingkat SD. Hal ini terlihat pada responden kelompok aksi memiliki persentase sebesar 64% dan kelompok kontrol memiliki persentase 58,33% pada tingkat pendidikan SD, sedangkan untuk tingkat SLTP dan SLTA tidak sebanyak responden yang lulusan SD. Responden yang tamatan SLTP yakni sebesar 12% untuk kelompok aksi dan sebesar 5,56% untuk kelompok kontrol. Sedangkan untuk tamatan SLTA kelompok aksi memiliki persentase sebesar 8% dan kelompok kontrol sebesar 5,56%. Dari kedua kelompok responden tidak ada yang lulusan sarjana (S1).

Secara umum pendidikan petani miskin di kelompok aksi dan kelompok kontrol adalah tamat SD dan tidak tamat SD. Rendahnya tingkat pendidikan petani miskin menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia petani tidak memadai di dalam pengembangan agribisnis dan akses kesempatan kerja di luar pertanian.

3. Lama Pengalaman Bertani

Berdasarkan hasil wawancara melalui kuesioner dengan para responden dapat disampaikan bahwa sebagian besar responden berpengalaman bertani lebih dari 15 (lima belas) tahun yakni 56% untuk kelompok aksi dan 72,22% untuk kelompok kontrol. Responden yang memiliki pengalaman bertani kurang dari 5 tahun sebanyak 20% untuk kelompok aksi dan 8,33% untuk kelompok kontrol. Pengalaman usaha bertani dari responden disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sebaran Responden Menurut Pengalaman Usaha Bertani

Pengalaman Usaha	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
< 5 tahun	5	20	3	8,33
6 – 10 tahun	3	12	5	13,89
11 – 15 tahun	3	12	2	5,56
>15 tahun	14	56	26	72,22
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah.

4. Luas Lahan Usaha Tani

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar responden baik yang telah maupun yang belum menerima program PUAP memiliki luas lahan untuk usahatani berkisar antara 0,1 - 0,5 Ha, dimana luas lahan dibawah 0,1 Ha sebesar 20% untuk kelompok aksi dan 16,67 % untuk kelompok kontrol dan untuk luas lahan diantara 0,1 – 0,5 Ha sebesar 56% untuk kelompok aksi dan 75% untuk kelompok kontrol. Responden yang luas lahan usaha taninya lebih dari 0,5 Ha untuk kelompok aksi sebanyak 24 % dan untuk kelompok kontrol sebesar 8,33%. Sebaran petani responden menurut luas lahan usaha tani disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sebaran Responden Menurut Luas Kepemilikan Lahan

Luas Lahan	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
<0,1 Ha	5	20	6	16,67
0,1 – 0,5 Ha	14	56	27	75
0,6 – 1 Ha	5	20	2	5,56
>1 Ha	1	4	1	2,78
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Lahan merupakan modal utama produksi pertanian di pedesaan. Penguasaan sumberdaya lahan pertanian bagi petani miskin pada kelompok aksi dan kelompok kontrol yang relatif sempit (kurang dari 0,5 Ha) menunjukkan adanya indikasi lemahnya akses lahan bagi petani kecil. Sempitnya lahan pertanian mengakibatkan keluaran output hasil pertaniannya juga sedikit dan tidak efisien.

5. Status Kepemilikan Lahan

Sebagian besar cara yang dilakukan bagi petani kelompok aksi didalam menggunakan lahan usaha tani adalah dengan sistem bagi hasil sebanyak 48%, sewa 36%, dan milik pribadi sebesar 16%. Sedangkan untuk kelompok kontrol cara petani didalam menggunakan lahan usaha tani adalah bagi hasil sebesar 33,33%, sewa 22,22%, milik pribadi 22,22%, dan menggunakan tanah proyek sebesar 22,22%. Tanah proyek yang dimaksud merupakan tanah milik pemerintah dimana masyarakat Desa Cibedug memiliki hak untuk menggarap lahan di tanah proyek secara gratis. Untuk pengaturan penggunaan lahan tanah proyek diatur oleh kepala desa. Status kepemilikan lahan dari responden disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Sebaran Responden Menurut Status Kepemilikan Lahan

Status Lahan	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Pribadi	4	16	8	22,22
Bagi Hasil	12	48	12	33,33
Sewa	9	36	8	22,22
Tanah Proyek	0	0	8	22,22
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa petani miskin pada kelompok aksi dan kelompok kontrol sebagian besar adalah petani penggarap, dimana petani menguasai lahan pertaniannya dengan cara bagi hasil atau sewa dengan pemilik lahan. Hal ini tentunya akan menjadi biaya tambahan bagi petani miskin di dalam usahataniannya, sehingga akan mengurangi pendapatan petani. Kurangnya modal aset yang dimiliki petani menyebabkan mereka menjalani kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

6. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga dapat mengukur tingkat kemampuan petani dalam menghidupi keluarganya secara layak dari hasil usahatani. Dengan luas lahan usaha tani yang biasanya relatif tetap maka besarnya tanggungan keluarga menjadi faktor yang akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga petani tersebut. Sebaran jumlah tanggungan keluarga (termasuk kepala keluarga) petani responden kelompok aksi dan kelompok kontrol disajikan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Sebaran Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah Tanggungan	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
1 – 4 orang	5	20	8	22,22
5 – 6 orang	16	64	18	50
>7 orang	4	16	10	27,78
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Berdasarkan Tabel 4.6. terlihat bahwa sebagian besar jumlah tanggungan keluarga di kedua kelompok tersebut berada di kisaran jumlah 5 – 6 orang yakni sebesar 64% untuk kelompok aksi dan 50% untuk kelompok kontrol. Salah satu ciri yang menonjol petani miskin di Desa Citapen adalah ukuran keluarga yang relatif besar. Jumlah anak cenderung besar, karena anak dinilai bukan sebagai aset (investasi), tetapi sebagai sumber faktor produksi (tenaga kerja) untuk menambah pendapatan keluarga. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga akan memperkecil pendapatan per kapita, karena dengan tambah anggota keluarga akan menyebabkan biaya pengeluaran semakin meningkat. Hal ini menyebabkan petani miskin makin sulit untuk keluar dari kemiskinan.

7. Komoditas Utama Usaha

Tanaman pangan dan hortikultura merupakan komoditas tanaman utama di daerah responden. Data menunjukkan sebagian besar komoditas utama petani adalah usahatani bidang hortikultura. Hal ini dikarenakan komoditas unggulan di Desa Citapen dan Desa Cibedug merupakan hortikultura. Sayuran yang banyak ditanam adalah sawi, kacang panjang, buncis, jagung dan terung. Hasil sebaran

kuesioner usahatani petani responden kelompok aksi dan kelompok kontrol menurut komoditas utama usaha disajikan dalam Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Sebaran Responden Menurut Komoditas Utama Usaha

Komoditas Utama	Kelompok Aksi		Kelompok Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tanaman Pangan	8	32	12	33,33
Hortikultura	16	64	21	58,33
Tan. Pangan dan Horti.	1	4	3	8,33
Total	25	100	36	100

Sumber : Data primer. Telah diolah.

4.2. Gambaran Pelaksanaan Program PUAP di Gapoktan Rukun Tani

Desa Citapen merupakan desa yang memiliki potensi akan pertaniannya seperti tanaman pangan, sayuran dan buah-buahan. Jenis sayuran yang ditanam di Desa Citapen yaitu jagung, sawi, cesin, kacang panjang, kacang tanah, mentimun, cabe, tomat, terong, buncis dll. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam petani di desa citapen adalah pepaya dan pisang.

Pada tahun 2001, berawal dari adanya persamaan kepentingan diantara petani-petani yang ada di wilayah desa Citapen dalam hal komoditi hortikultura yang ditanam terutama komoditi sayuran dan juga dalam hal pemasaran hasil panen. Saat itu, atas prakarsa petugas lapangan dari PT. TANINDO, dibentuklah satu kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Pondok Menteng yang beranggotakan 25 orang.

Dalam rangka menyatukan kepentingan yang sama ke arah usaha Agribisnis terpadu terutama dalam mengakses pasar dan permodalan, petani – petani lainnya yang tergabung dalam kelompok tani tanaman pangan, kelompok tani ternak dan kelompok tani pengrajin olahan hasil pertanian, bergabung menjadi satu membentuk satu himpunan kelompok tani yang bernama 'Himpunan Rukun Tani'.

Pada tanggal 29 Juni 2007 melalui bimbingan Petugas Penyuluh Pertanian, 'Himpunan Rukun Tani' dikukuhkan melalui rapat pengukuhan Gapoktan yang disahkan oleh Kepala desa dan Camat menjadi Gapoktan Rukun Tani dengan anggota 130 orang. Sebagai legalitas Gapoktan, tanggal 26

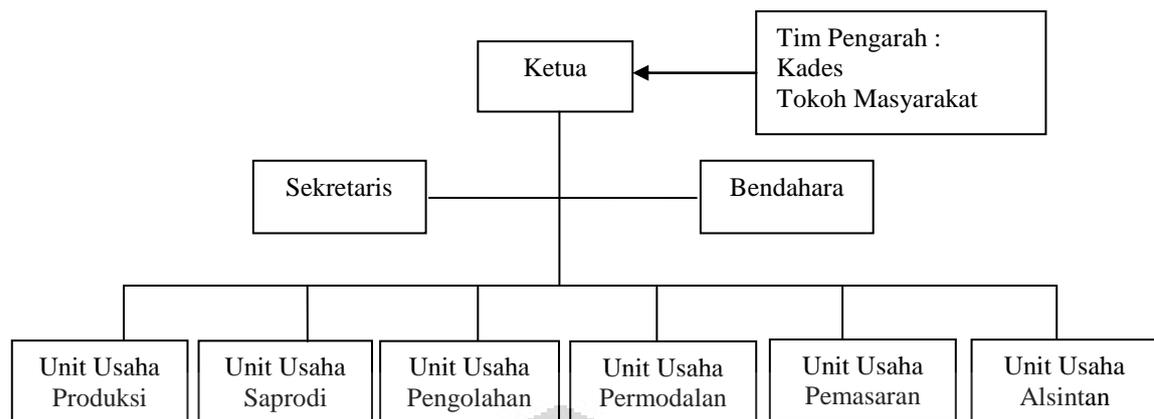
November 2008, Gapoktan Rukun Tani telah dikukuhkan dihadapan Notaris (Akta Notaris Miranti Tresnaning Timur, SH No. 14 tanggal 26 November 2008).

Visi gapoktan rukun tani adalah Terwujudnya Masyarakat Tani yang Maju dan Sejahtera. Dengan misi yang akan dilaksanakan oleh Gapoktan Rukun Tani adalah 1) Meningkatkan peran kelompok tani dan gapoktan dalam peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani; 2) Memfasilitasi anggota dalam penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), permodalan dan pemasaran hasil usaha tani; 3) Meningkatkan posisi tawar petani dalam pemasaran hasil usaha tani; 4) Meningkatkan fungsi kelompok tani sebagai wahana belajar, wahana kerjasama dan unit produksi.

Gapoktan Rukun Tani sekarang ini memiliki tujuh kelompok tani yaitu Kelompok Tani Pondok Menteng, Kelompok Tani Silih Asih, Kelompok Tani Sukamaju, Kelompok Tani Bina Mandiri, Kelompok Tani Tani Jaya, Kelompok Tani Sawah Lega, dan Kelompok Tani Wanita Citapen Berkarya. Berdasarkan ketujuh kelompok tani, enam diantaranya merupakan kelompok tani yang bergerak di bidang pertanian dan perternakan. Selain itu, satu kelompok tani yaitu Kelompok Tani Wanita Citapen Berkarya merupakan kelompok tani yang bergerak di pengolahan hasil.

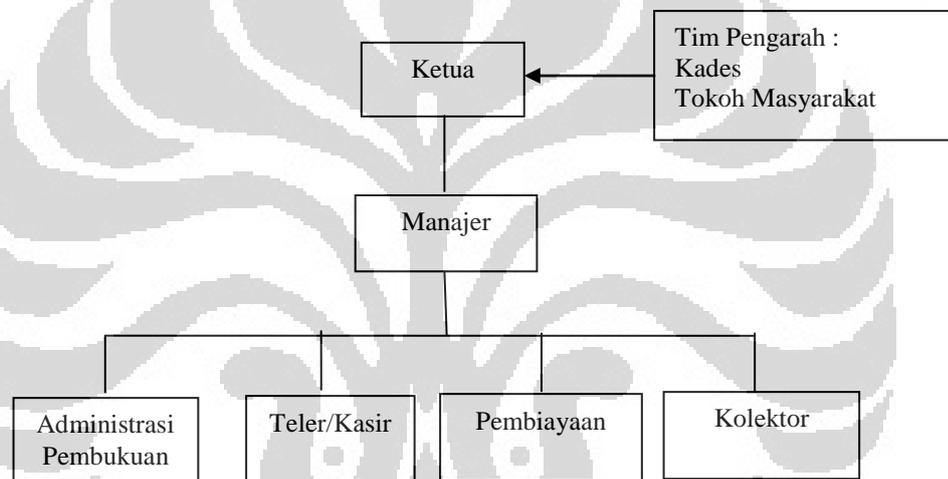
Kegiatan usaha Gapoktan rukun tani adalah sebagai berikut : usaha tani atau budidaya, usaha penyediaan benih/pembibitan dan pupuk, usaha industri rumah tangga berupa pengolahan makanan ringan (sale pisang, pangsit dll) dan usaha simpan pinjam /LKMA. Para petani yang ada di Desa Citapen menjual atau memasarkan sayurannya kepada Gapoktan Rukun Tani. Melalui Gapoktan Rukun Tani Petani tidak mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya, karena Gapoktan Rukun Tani yang akan memasarkannya di pasar-pasar daerah Bogor.

Struktur kepengurusan organisasi Gapoktan Rukun Tani terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, serta adanya seksi unit-unit usaha seperti diperlihatkan dalam Gambar 4.1. Unit-unit usaha tersebut terdiri atas unit produksi, unit saprodi, unit pengolahan, unit permodalan, unit pemasaran dan unit alsintan. Sementara itu kelembagaan unit usaha simpan pinjam yang dipersiapkan menjadi LKMA adalah terdiri dari manajer, seksi administrasi, kasir, pembiayaan, dan seksi kolektor seperti yang disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Gapoktan Rukun Tani

Sumber : Gapoktan Rukun Tani (2012)



Gambar 4.2. Struktur Organisasi LKMA Gapoktan Rukun Tani

Sumber : Gapoktan Rukun Tani (2012)

Struktur kekuasaan terbangun dalam kelembagaan gapoktan dan LKM-A mengikuti apa yang dirumuskan dalam AD/ART gapoktan. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat anggota dan rapat pengurus yang dilakukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat. Rapat anggota dan pengurus dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sekali dan jika ada program-program atau kegiatan-kegiatan penunjang dari pemerintah, biasanya pengurus Gapoktan mengundang anggotanya untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh instansi dinas terkait.

RAT dilaksanakan tepat waktu setiap setahun sekali. Biasanya sebagai insentif bagi nasabah yang mengembalikan angsurannya tepat waktu, pengurus

gapoktan memberikan hadiah berupa parcel sembako kepada nasabahnya. Keuntungan jasa yang didapat dari usaha simpan pinjam 50% nya dikembalikan kembali kepada anggotanya berupa bingkisan sembako, sebesar 30% nya untuk pengembangan modal gapoktan dan 20% untuk biaya keperluan administrasi gapoktan dan gaji pengurus gapoktan dan LKM-A.

Secara umum sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki gapoktan rukun tani masih kurang. Kantor sekretariat gapoktan dan LKM-A masih berstatus menumpang di rumah ketua gapoktan, demikian juga halnya toko/kios sarana produksi. Gapoktan rukun tani sudah memiliki komputer sendiri, namun belum mempunyai sarana penunjang lainnya, seperti LCD, printer, dll. Sarana dan prasarana penunjang ini sangat penting, bukan saja bagi kelancaran usaha gapoktan dan LKM-A, namun juga dapat dijadikan alat kohesi sosial bagi anggotanya.

Pemerintah menunjuk gapoktan sebagai kelembagaan perdesaan yang mengelola dan menyalurkan dana PUAP. Gapoktan sebagai salah satu kelembagaan pertanian berperan dalam mengatur dana PUAP agar dana tersebut dapat bermanfaat bagi anggotanya. Pemerintah memberikan kewenangan pada masing-masing gapoktan dalam penyaluran dana PUAP kepada anggotanya. Dalam hal ini, tidak ada Standard Operational Prosedure (SOP) khusus yang ditetapkan pemerintah pada penyaluran dana PUAP kepada anggotanya. Yang perlu diperhatikan adalah dana tersebut harus disalurkan untuk keperluan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan usaha agribisnis. Dalam hal ini, Gapoktan memiliki aturan main sendiri dalam menyalurkan dana PUAP kepada anggotanya, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun informal.

Total keseluruhan dana PUAP yang diterima Gapoktan Rukun Tani adalah sebesar Rp. 100.000.000,-. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan dalam kegiatan simpan pinjam kepada petani untuk keperluan produksi atau untuk kegiatan pemasaran hasil dan usaha lainnya. Selain dialokasikan untuk simpan pinjam, dana PUAP juga digunakan untuk kegiatan penyediaan saprodi seperti pupuk, benih, dan obat-obatan. Penyaluran dana PUAP di Gapoktan Rukun Tani yang ditetapkan oleh anggota kelompok tani adalah berupa paket pinjaman berupa

uang tunai dan juga dapat berupa barang, tergantung dari kebutuhan para anggota kelompok tani. Jumlah maksimal pinjaman bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan petani. Kisaran pinjaman dana PUAP adalah Rp. 500.000,- sampai Rp. 2.000.000,- untuk pertama kali pinjaman. Jika pengembalian pinjaman nasabah lancar maka pinjaman berikutnya dinaikkan menjadi kisaran Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.000.000,-.

Pada Gapoktan Rukun Tani, penyaluran dana PUAP kepada anggotanya menerapkan beberapa persyaratan, diantaranya : 1) Terdaftar sebagai anggota kelompok tani; 2) Fotocopi KTP; 3) Fotocopi kartu keluarga; 4) Tidak memiliki sangkutan/utang kepada pihak lain. Mekanisme penyaluran dana PUAP yang ditetapkan oleh anggota gapoktan rukun tani adalah sebagai berikut :

1. Anggota membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) yang diketahui oleh ketua kelompok.
2. RUA yang telah diketahui oleh ketua kelompok disampaikan ke LKM-A.
3. RUA diverifikasi oleh pengurus gapoktan dan tim pengarah menyangkut lokasi dan kelayakan usaha tani anggota.
4. Apabila RUA layak, kemudian anggota membuat surat permohonan pembiayaan dan akad kredit yang diketahui oleh ketua kelompok sebagai penjamin melalui manager LKM-A.
5. Apabila persyaratan sudah lengkap meliputi fotocopi KTP, KK dan surat kesediaan membayar bermaterai 6000, maka kredit dicairkan melalui bagian pembiayaan di LKM-A Gapoktan Rukun Tani.
6. Waktu pencairan dana pinjaman tersebut disesuaikan dengan saldo/kas yang ada di Gapoktan.

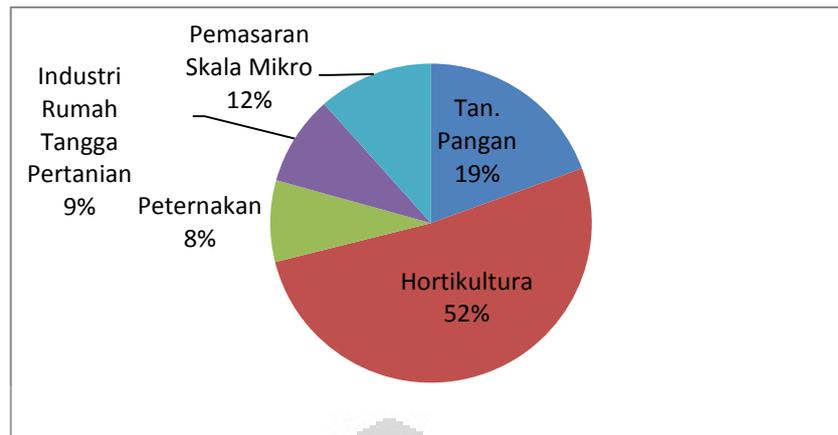
Namun dalam teknisnya, bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman dana PUAP, persyaratan utama adalah diketahui oleh ketua kelompok dan menyerahkan fotocopi KTP dan Kartu Keluarga serta Surat Kesediaan Membayar bermaterai 6000. Aspek riwayat petani merupakan penilaian utama pengurus didalam memutuskan pemberian pinjaman.

Bunga pinjaman yang disepakati oleh anggota adalah sebesar 1,8% per bulan, dengan waktu pengembalian maksimal selama 10 bulan. Cara pengembalian pinjaman bisa dilakukan per minggu, per bulan, ataupun dibayar

setiap kali panen. Bagi nasabah/anggota yang mendapatkan musibah (bencana alam, wabah serangan hama dan penyakit, atau gagal panen) pinjaman tetap menjadi tanggungjawab nasabah/petani dan tidak dikenakan jasa. Gapoktan rukun tani juga menerapkan sanksi dan insentif bagi para anggotanya. Yakni jika anggotanya melakukan pembayaran yang sangat lancar, maka gapoktan melalui LKM-A akan memberikan penghargaan berupa peningkatan jumlah pinjaman dan atau hadiah, dan jika anggotanya mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang sudah jatuh tempo selama 3 bulan berturut-turut, maka ketua kelompok tani sebagai penjamin berkewajiban melakukan penagihan secara langsung kepada anggota yang bersangkutan, dan apabila yang bersangkutan masih tidak membayar maka untuk selanjutnya tidak akan diberi pinjaman lagi.

Dari hasil laporan tahunan Gapoktan Rukun Tani menunjukkan bahwa nasabah/anggota terus bertambah setiap tahunnya. Hasil rekapitulasi penyaluran dana PUAP menurut usaha produktif yang dibiayai BLM PUAP dari tahun 2009 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012, jumlah anggota gapoktan rukun tani sebanyak 236 orang, dimana pada awal pendirian gapoktan rukun tani hanya berjumlah 130 orang.

Mayoritas anggota kelompok tani yang menggunakan dana PUAP adalah anggota dengan jenis usaha produktif di bidang tanaman hortikultura sebanyak 52%, disusul anggota terbanyaknya adalah dari anggota dengan jenis usahanya dibidang tanaman pangan sebanyak 19% dan pemasaran usaha mikro 12%. Dan yang paling kecil anggota yang menggunakan dana PUAP adalah di industri rumah tangga pertanian dan peternakan yang masing-masing hanya 9% dan 8%. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar mata pencaharian di desa citapen secara turun temurun dari dulunya adalah bergerak di bidang pertanian. Kurangnya pengetahuan dan teknologi mengenai tatacara pengolahan hasil pertanian menjadi penyebab utama belum berkembangnya industri rumah tangga pertanian. Untuk lebih jelas hasil rekapitulasi penyaluran dana PUAP menurut usaha dapat dilihat dalam Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Persentase Usaha Produktif yang dibiayai BLM PUAP dari Tahun 2009 –2012
Sumber : Gapoktan Rukun Tani (2012)

Dilihat dari sisi keuangannya, laporan laba/rugi setiap tahunnya gapoktan rukun tani mengalami peningkatan laba secara terus menerus. Hal ini mengindikasikan bahwa perguliran dana PUAP berjalan secara berkelanjutan. Laba yang didapat dari perguliran dana PUAP pada Tahun 2011 sebesar Rp. 10.368.000,- atau bertambah sebesar 10,37% dari dana awal bantuan PUAP. Jika dilihat dari laporan neraca gapoktan rukun tani pada Tahun 2011 total aktiva meningkat menjadi Rp. 114.868.000,-. Hal ini berarti pengembalian dana PUAP sudah melewati 100% dari dana awal. Ini menunjukkan suatu kemajuan pada Gapoktan Rukun Tani, selain karena labanya yang terus meningkat, ini berarti pengguna dana PUAP di desa Citapen terus bertambah dan berimplikasi terjadinya peningkatan usaha produktif di desa Citapen sehingga berimplikasi terjadinya pertambahan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di desa Citapen akan meningkat.

Tingkat pembiayaan yang bermasalah (kredit macet) yang terjadi di Gapoktan rukun tani adalah dilihat dari jumlah pinjaman yang menunggak lebih dari 3 bulan. Data total dana PUAP yang mengalami kredit macet sampai bulan Pebruari tahun 2012 adalah sebesar Rp. 26.137.000,- atau sebesar 6,85% dari dana PUAP yang telah disalurkan kepada anggota dari awal pencairan sampai bulan Pebruari 2012 yaitu sebesar Rp. 381.250.000,-. Berdasarkan wawancara dengan para pengurus gapoktan, terjadinya tunggakan dari anggota itu pertama disebabkan oleh terjadinya gagal panen akibat cuaca ataupun karena hama dan

penyakit. Kurangnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan usahatani tidak mencapai tingkat efektif produktivitasnya. Perubahan iklim kemarau yang panjang juga disinyalir ikut berpengaruh terhadap hasil panen. Usahatani untuk pertanian erat kaitannya dengan faktor resiko yang tinggi. Selain itu masih adanya anggapan dari beberapa anggota yang menganggap bahwa pinjaman yang diperoleh dari program PUAP merupakan dana hibah yang tidak harus dikembalikan.

Masalah lain yang dihadapi gapoktan rukun tani adalah unit-unit usaha yang ada di Gapoktan belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara dengan pengurus gapoktan menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dari pengurus terutama kurangnya kapabilitas manajerial pengurus gapoktan dan LKM-A. Kendala kurangnya penguasaan teknologi maju berbasis IPTEK. Terutama dalam pengelolaan manajemen keuangan penulis melihat pencatatan dan pembukuan masih manual. Sehingga bila diperlukan data tentang siapa saja yang sudah mendapatkan dana PUAP lebih dari 2 kali dan siapa saja yang menunggak, pencarian data membutuhkan waktu lama. Fenomena rangkap jabatan antar kelembagaan yang ada di tingkat desa juga ditemukan di gapoktan rukun tani. Banyaknya kesibukan baik untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan jabatan rangkap yang diembannya, menyebabkan pengurus gapoktan rukun tani tidak fokus didalam pengembangan gapoktan dan LKM-A.

4.3. Analisis Kinerja Gapoktan

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengumpulan data untuk analisis kinerja gapoktan diperoleh dari data kuisisioner yang diberikan oleh responden penerima dana bantuan PUAP. Sebelum dilakukan analisis kinerja gapoktan dengan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA), dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas dari jawaban kuisisioner yang diberikan oleh responden penerima dana PUAP. Kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya (Kuncoro, 2003).

Pengujian validitas bertujuan untuk menguji sejauhmana ketepatan dan kecermatan alat ukur tertentu dalam melakukan fungsi ukurannya. Semakin tinggi validitas suatu variabel (atribut) maka pengujian tersebut semakin mengenai sasarannya dan semakin menunjukkan apa yang harus ditunjukkannya (Wijaya, 2011). Cara analisisnya adalah dengan menggunakan korelasi Pearson yaitu dengan cara menghitung koefisien korelasi antara masing-masing nilai pada nomor pertanyaan dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut. Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh r harus diuji signifikansinya dengan membandingkannya dengan r tabel. Bila r hitung $>$ dari r tabel, maka nomor pertanyaan tersebut valid (Wijaya, 2011). Analisis dilakukan dengan menggunakan program Statistical Package for Sosial Science (SPSS) versi 17. Hasil uji validitas untuk kuesioner disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas dari Jawaban Kuesioner

Variabel	Indikator	Nilai r hitung	
		Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
A. Aspek Organisasi	1. Gapoktan memiliki AD/ART	0,663	0,673
	2. Gapoktan melakukan pemisahan pengurus Gapoktan dan Pengelola LKMA	0,724	0,451
	3. Gapoktan mempunyai rencana kerja	0,663	0,598
	4. Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus	0,654	0,519
	5. Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu	0,676	0,476
	6. Gapoktan memiliki berbadan hukum	0,464	0,648
B. Aspek Pengelolaan Dana PUAP	1. Sosialisasi program PUAP	0,552	0,578
	2. Kemudahan persyaratan penerima PUAP	0,687	0,445
	3. Waktu realisasi pinjaman	0,687	0,641
	4. Pencatatan dan pembukuan	0,447	0,470
	5. Analisa kelayakan usaha	0,601	0,481
	6. Pelaporan yang dibuat pengurus Gapoktan	0,464	0,641
	7. Pembinaan usaha anggota	0,438	0,456
	8. Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan	0,531	0,658
	9. Insentif dan sanksi	0,745	0,493
	10. Sarana dan Prasarana	0,745	0,448
C. Aspek Usaha Agribisnis	1. Gapoktan menyediakan saprodi pertanian	0,440	0,673
	2. Adanya peran penyuluh pendamping	0,433	0,641
	3. Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan	0,425	0,418
	4. Pemasaran bersama dilakukan oleh Gapoktan	0,539	0,673

Nilai r tabel = 0,3961 (df = 23 dan selang kepercayaan 95%)

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Hasil pengujian validitas untuk masing-masing hasil pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan terhadap seluruh pernyataan lebih besar dari r tabel pada selang kepercayaan 95 persen yaitu 0,3961. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuisisioner adalah signifikan dan dapat dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas dimaksudkan untuk menguji seberapa jauh konsistensi suatu alat ukur, sehingga alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang (Wijaya, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Wijaya (2011), mengemukakan bahwa jawaban seseorang akan cukup konsisten jika nilai koefisien alpha antar 0,64 sampai 0,90. Hal ini berarti bahwa kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran dalam kuisisioner cukup rendah sehingga penggunaannya dapat diandalkan dan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten apabila penulis menyebarkan kuisisioner secara berulang kali dalam waktu yang berlainan. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 17. Adapun hasil pengujian reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Uji Reliabilitas dari Jawaban Kuesioner

No.	Data	α
1	Tingkat Kepentingan	0,886
2	Tingkat Kepuasan	0,879

Sumber : Data primer. Telah diolah

Berdasarkan sajian data pada Tabel 4.9, seluruh indikator dalam pernyataan kuisisioner memiliki nilai Cronbach's Alpha antara 0,64 sampai 0,90 yang berarti terjadinya kesalahan ukur dalam kuisisioner yang diisi oleh petani responden yakni kelompok penerima dana PUAP di Gapoktan Rukun Tani cenderung rendah.

4.3.2. Metode *Importance-Performance Analysis* (IPA)

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja gapoktan dengan menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA). Tabel 4.10 adalah data antara tingkat kepentingan dan kepuasan responden yang akan digunakan untuk membuat diagram kartesius mengenai posisi penempatan data berdasarkan *Importance-Performance Analysis* (IPA).

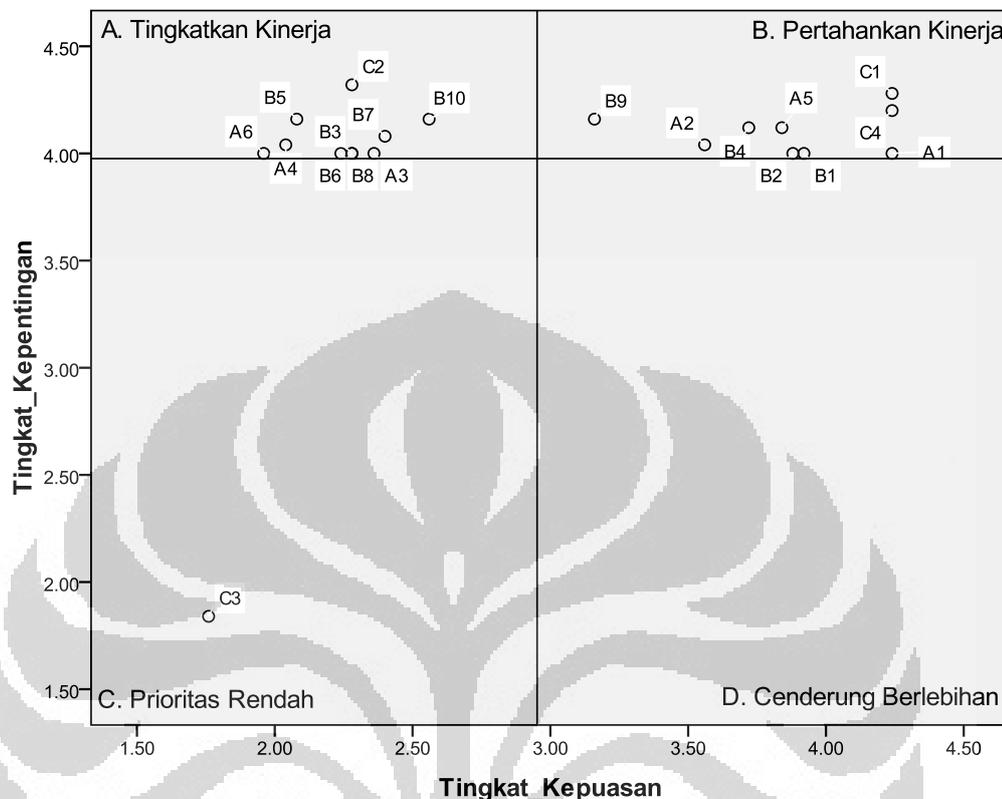
Tabel 4.10. Data Tingkat Kepentingan dan Tingkat Kepuasan Responden

Variabel	Indikator	Tingkat Kepentingan	Tingkat Kepuasan
A. Aspek Organisasi	1. Gapoktan memiliki AD/ART	4	4,24
	2. Gapoktan melakukan pemisahan pengurus Gapoktan dan Pengelola LKMA	4,04	3,56
	3. Gapoktan mempunyai rencana kerja	4	2,36
	4. Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus	4,04	2,04
	5. Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu	4,12	3,84
	6. Gapoktan memiliki berbadan hukum	4	1,96
B. Aspek Pengelolaan Dana PUAP	1. Sosialisasi program PUAP	4	3,92
	2. Kemudahan persyaratan penerima PUAP	4	3,88
	3. Waktu realisasi pinjaman	4	2,28
	4. Pencatatan dan pembukuan	4,12	3,72
	5. Analisa kelayakan usaha	4,16	2,08
	6. Pelaporan yang dibuat pengurus Gapoktan	4	2,28
	7. Pembinaan usaha anggota	4,08	2,4
	8. Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan	4	2,24
	9. Insentif dan sanksi	4,16	3,16
	10. Sarana dan Prasarana	4,16	2,56
C. Aspek Usaha Agribisnis	1. Gapoktan menyediakan saprodi pertanian	4,28	4,24
	2. Adanya peran penyuluh pendamping	4,32	2,28
	3. Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan	1,8	1,76
	4. Pemasaran bersama dilakukan oleh Gapoktan	4,2	4,24
Nilai Rata-rata		3,976	2,952

Sumber : Data primer. Telah diolah.

IPA menyatukan pengukuran faktor tingkat kepuasan (*performance*) dan tingkat kepentingan (*importance*) yang kemudian digambarkan dalam diagram dua dimensi yaitu diagram *importance-performance* untuk mendapatkan usulan praktis dan memudahkan penjelasan data, dimana pusat pemotongan garis adalah nilai rata-rata yang terdapat pada dimensi kepentingan dan kepuasan. Grafik IPA

dibagi menjadi empat buah kuadran berdasarkan hasil pengukuran *Importance Performance Analysis* seperti yang terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Pembagian Kuadran IPA Terhadap Hasil Pengukuran Kinerja

Sumber : Data primer. Telah diolah

Berdasarkan kuadran IPA pada Gambar 4.4. di atas, maka indikator yang berkaitan dengan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan responden Gapoktan Rukun Tani dapat dikelompokkan dalam masing-masing kuadran sebagai berikut :

1. Kuadran A : Tingkatkan Kinerja

Pada kuadran A terdapat sepuluh variabel (50%) yang dianggap penting tetapi dalam kenyataannya indikator-indikator tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan (tingkat kepuasan responden masih sangat rendah). Di wilayah ini, gapoktan perlu meningkatkan kinerja pada berbagai indikator tersebut dan melakukan perbaikan secara terus menerus agar *performance* dalam kuadran ini meningkat. Indikator-indikator yang termasuk dalam kuadran ini adalah :

- a. Gapoktan mempunyai rencana kerja (A3)
- b. Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan anggota (A4)
- c. Gapoktan memiliki badan hukum (A6)
- d. Waktu dan realisasi pinjaman (B3)
- e. Analisa kelayakan usaha (B5)
- f. Pelaporan yang dibuat pengurus gapoktan (B6)
- g. Pembinaan Usaha Anggota (B7)
- h. Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan (B8)
- i. Sarana dan Prasarana (B10)
- j. Adanya peran penyuluh pendamping (C2)

Pada aspek organisasi, variabel gapoktan mempunyai rencana kerja, gapoktan menyelenggarakan rapat pertemuan anggota, gapoktan memiliki badan hukum merupakan variabel yang belum optimal. Dari hasil wawancara dengan petani pertemuan anggota gapoktan dilakukan hanya ketika ada kegiatan program dari dinas pertanian terkait dan rapat anggota tahunan.

Pada aspek pengelolaan dana PUAP, variabel waktu dan realisasi pinjaman, analisa kelayakan usaha, pelaporan yang dibuat pengurus gapoktan, pembinaan usaha anggota dan adanya pengawasan dalam hal pembiayaan merupakan variabel yang dinilai belum optimal. Sebagian petani berpendapat waktu dan realisasi pinjaman sangat tergantung dari kondisi kas keuangan di LKM-A. Pencairan pinjaman dana PUAP dilakukan atas dasar persetujuan dari ketua kelompok tani dan adanya kegiatan usaha tani. Variabel adanya pengawasan dalam hal pembiayaan (penyaluran dana) dinilai kurang puas bagi responden. Petani menganggap komite pengawas yang telah dibentuk hanya sebagai tuntutan untuk kelengkapan administrasi saja, dan dalam pelaksanaannya pengurus gapoktan yang menentukan petani dapat menerima dana PUAP.

Pada aspek usaha agribisnis variabel adanya peran penyuluh pendamping merupakan variabel yang dinilai belum optimal. Dari hasil wawancara dengan petani responden, sebagian mereka berpendapat penyuluh baru datang kelapangan ketika ada kegiatan/tamu dari dinas pertanian terkait. Berdasarkan hasil analisis, maka variabel-variabel yang termasuk dalam

kuadran A adalah sebagai prioritas utama bagi gapoktan untuk meningkatkan kinerjanya untuk lebih optimal.

2. Kuadran B : Pertahankan Kinerja

Pada kuadran B memuat atribut-atribut yang dianggap penting oleh responden dan atribut-atribut yang dianggap oleh responden sudah sesuai dengan yang dirasakan sehingga tingkat kepuasan relatifnya lebih tinggi. Pada wilayah ini terdapat sembilan variabel (45%) yang dinilai sudah optimal dalam pelaksanaannya. Variabel-variabel tersebut diantaranya :

- a. Gapoktan memiliki AD/ART (A1)
- b. Gapoktan melakukan pemisahan pengurus gapoktan dan pengelola LKMA (A2)
- c. Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu (A5)
- d. Sosialisasi program PUAP (B1)
- e. Kemudahan persyaratan penerima PUAP (B2)
- f. Pencatatan dan Pembukuan (B4)
- g. Insentif dan Sanksi (B9)
- h. Gapoktan menyediakan saprodi pertanian (C1)
- i. Pemasaran bersama dilakukan oleh gapoktan (C4)

Pada aspek organisasi, variabel gapoktan memiliki AD/ART, gapoktan melakukan pemisahan pengurus gapoktan dan pengelola LKMA dan gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu telah terlaksana dengan baik sehingga memberikan kepuasan bagi seluruh anggotanya. Pada aspek pengelolaan dana PUAP, variabel sosialisasi program PUAP, kemudahan persyaratan penerima PUAP, pencatatan dan pembukuan, serta insentif dan sanksi merupakan variabel yang dianggap cukup puas oleh petani responden. Pada aspek usaha agribisnis, variabel gapoktan menyediakan saprodi pertanian dan pemasaran bersama dilakukan oleh gapoktan dinilai penting dan memiliki kinerja yang baik. Semua variabel yang telah dijelaskan tersebut patut untuk dipertahankan sehingga dapat meningkatkan kinerja gapoktan secara keseluruhan.

3. Kuadran C : Prioritas Rendah

Pada kuadran C memuat atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh responden dan pada kenyataannya kinerjanya kurang istimewa. Yang termasuk dalam Kuadran C hanya terdapat satu variabel (5%) yaitu Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan (C3). Pada aspek usaha agribisnis, variabel gapoktan mengadakan kerjasama keuangan dinilai masih belum optimal dan petani responden sebagian besar berpendapat gapoktan kerjasama dengan keuangan tidak penting. Alasan petani responden gapoktan tidak penting mengadakan kerjasama keuangan dengan lembaga keuangan/bank karena adanya anggapan bahwa dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan/bank akan menimbulkan bunga pinjaman yang lebih besar dan sanksi yang diterapkan akan menjadi lebih berat terhadap petani. Mengingat usaha petani disesuaikan dengan iklim dan pasar serta memiliki resiko yang tinggi.

Sebagian besar petani menganggap kerjasama keuangan dengan lembaga lain tidak penting, ini mengindikasikan bahwa kesadaran petani akan pentingnya pengembangan modal untuk keberlanjutan organisasi gapoktan masih rendah. Hal ini juga didukung dengan laporan neraca yang menunjukkan modal keswadayaan yang masih rendah yakni sebesar Rp. 11.020.000,- atau sebesar 10% dari jumlah aktiva Gapoktan Rukun Tani. Sehingga diperlukan penyuluhan kepada anggota gapoktan akan pentingnya peningkatan modal usaha gapoktan baik dari swadaya anggota maupun dari lembaga keuangan lain.

4. Kuadran D : Cenderung Berlebihan

Pada kuadran D tidak terdapat variabel yang dinilai memiliki tingkat kepentingan rendah dengan tingkat kinerja tinggi. Hal itu dikarenakan petani responden berpendapat sebagian besar variabel-variabel indikator kinerja dianggap penting.

4.4. *Impact Evaluation* (Evaluasi Dampak)

4.4.1. Uji T-Test pada Rata-rata Pendapatan Per kapita Per bulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol Sebelum Periode Intervensi Program

Untuk mengetahui apakah pemilihan kelompok kontrol sudah tepat yaitu memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok aksi, dilakukan pengujian pada rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani kelompok aksi dan kelompok kontrol sebelum periode intervensi program (*baseline*). Hipotesis yang akan diuji adalah rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani kelompok aksi sama dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani pada kelompok kontrol. Pengolahan data uji T-Tes untuk dua sample independen dilakukan dengan program SPSS versi 17 (Lampiran 6).

Uji hipotesis :

1. $H_0 : u_1 = u_2$

$H_1 : u_1 \neq u_2$

Dimana:

u_1 = rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani kelompok PUAP (kelompok aksi)

u_2 = rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani kelompok non PUAP (kelompok kontrol)

2. $\alpha = 0,05$

3. Daerah kritis, H_0 ditolak jika nilai P value (Sig. 2-tailed) $< 0,05$ (Sulistyo, 2012).

4. Statistik uji, Dari tabel t-test for equality of means didapat nilai Exact. Sig (2-tailed) untuk nilai equal variances assumed = 0,826.

5. Kesimpulan, Karena nilai P value (Sig. 2-tailed) $> 0,05$ maka hipotesa H_0 diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% secara statistik rata-rata tingkat pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani pada kelompok aksi sama dengan rata-rata tingkat pendapatan per kapita per bulan rumah tangga petani pada kelompok kontrol.

4.4.2. Perhitungan Selisih Rata-rata Tingkat Pendapatan Kelompok Aksi

Setelah diperoleh kesamaan rata-rata pendapatan per kapita per bulan melalui uji *t* langkah berikutnya adalah menghitung selisih rata-rata tingkat pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Aksi. Selisih diperoleh dengan cara mengurangkan rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada saat *impact* (setelah intervensi program) yaitu tahun 2012 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada saat *baseline* (sebelum intervensi program) yaitu tahun 2009. Data pendapatan per kapita per bulan dan Status Kemiskinan rumah tangga pada Kelompok Aksi terdapat pada Lampiran 5. Dari tabel tersebut dilakukan pengukuran perubahan nilai indikator yaitu tingkat pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Aksi. Status kemiskinan diperoleh dengan cara membandingkan rata-rata pendapatan per kapita per bulan dengan Garis Kemiskinan.

4.4.2.1. Perubahan Rata-Rata Pendapatan per kapita per bulan Pada Kelompok Aksi

Intervensi kegiatan program PUAP terhadap perubahan rata-rata pendapatan rumah tangga penerima manfaat dapat dilihat pada Tabel 4.11. Dari tabel tersebut intervensi kegiatan pinjaman bergulir Program PUAP mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebanyak Rp. 62.653,- atau **76,48%**. Untuk memperoleh gambaran riil perubahan pendapatan, diperhitungkan pula inflasi efektif dari tahun 2010 sampai Agustus 2012 saat pelaksanaan penelitian, yaitu 14% (BPS). Dengan demikian, dibandingkan dengan keadaan tahun 2009 maka rata-rata pendapatan per kapita per bulan meningkat sebesar Rp. 44.898,- atau sekitar **54.80%**.

Tabel 4.11. Perubahan Rata-rata Pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Aksi

Baseline	Impact		Perubahan			
	Nominal	Riil	Nominal		Riil	
(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
81.924	144.576	126.821	62.653	76,48	44.898	54,80

Sumber : Data primer. Telah diolah.

4.4.2.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Aksi

Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Barat di daerah pedesaan tahun 2009 sebesar Rp. 175.193,- dan Garis Kemiskinan Jawa Barat di daerah pedesaan tahun 2012 sebesar Rp. 216.610,- maka perubahan status kemiskinan rumah tangga Kelompok Aksi (nominal) dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi (Nominal)

Baseline		Impact			
Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Tidak Miskin	(%)
25	100	21	84	4	16

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Sebelum adanya intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir program PUAP di Kelompok Aksi menunjukkan kemiskinan sebesar 100% atau sebanyak 25 rumah tangga memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Setelah mendapat intervensi program, proporsi rumah tangga Miskin pada kelompok aksi turun sebesar 16%, atau berkurang sebanyak 4 rumah tangga, sehingga rumah tangga dengan status Miskin menjadi 84% dan rumah tangga Tidak Miskin 16%.

Tabel 4.13. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga pada Kelompok Aksi (Riil)

Baseline		Impact			
Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Tidak Miskin	(%)
25	100	21	84	4	16

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Dengan mempertimbangkan inflasi sebesar 14% (BPS), dapat diketahui perubahan status kemiskinan secara riil setelah intervensi program dibandingkan dengan kondisi awal (*baseline*). Secara riil kemiskinan pada Kelompok Aksi turun menjadi 16% atau berkurang sebanyak 4 rumah tangga miskin dari kondisi awal menjadi rumah tangga tidak miskin. Sehingga rumah tangga Miskin berkurang menjadi 21 responden atau 84%. Perubahan tingkat kemiskinan sama apabila dihitung secara nominal dan riil.

4.4.3. Perhitungan Selisih Rata-rata Pendapatan Pada Kelompok Kontrol

Kelompok kontrol adalah rumah tangga petani miskin yang tidak memperoleh manfaat kegiatan Pinjaman Bergulir Program PUAP dan belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan karakteristik kemiskinan sama dengan rumah tangga pada Kelompok Aksi yang diukur berdasarkan kesamaan rata-rata konsumsi per kapita per bulan pada periode sebelum intervensi program atau *Baseline* (tahun 2009). Sama halnya dengan analisa yang dilakukan terhadap Kelompok Aksi, pada rumah tangga Kelompok Kontrol juga dihitung perubahan pendapatan per kapita per bulan antara tahun *baseline* (2009) dan tahun *impact* (2012) serta dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Jawa Barat 2009 dan 2012 untuk mengetahui perubahan status kemiskinannya. Lampiran 6 adalah rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga Kelompok Kontrol.

4.4.3.1. Perubahan Rata-rata Konsumsi per kapita per bulan pada Kelompok Kontrol

Seperti halnya pada Kelompok Aksi pada rumah tangga Kelompok Kontrol juga terjadi perubahan konsumsi per kapita per bulan dari periode 2009 sampai 2012, seperti yang terlihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Perubahan Rata-rata Pendapatan per kapita per bulan Kelompok Kontrol

Baseline (Rp.)	Impact		Perubahan			
	Nominal (Rp.)	Riil (Rp.)	Nominal		Riil	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
80.451	130.185	114.198	49.734	63,82	33.746	41,95

Sumber : Data primer. Telah diolah.

Pada tahun 2009 rata-rata pendapatan per kapita per bulan adalah sebesar Rp. 80.4521,- artinya secara rata-rata rumah tangga petani pada Kelompok Kontrol tergolong Miskin karena pendapatan per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan Jawa Barat tahun 2009 yaitu Rp.175.193,-. Pada tahun 2012 rata-rata pendapatan per kapita per bulan meningkat sebesar Rp. 49.734,- atau sebesar 63,82% menjadi Rp. 130.185,-. Untuk melihat perubahan secara riil terhadap kondisi awal, dilakukan penghitungan dengan mempertimbangkan

tingkat inflasi efektif sebesar 14% sehingga diperoleh perubahan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp. 33.746,- atau sebesar 41,95 %.

4.4.3.2. Perubahan Tingkat Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Kontrol

Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Barat tahun 2009 dan 2012, diperoleh data status kemiskinan rumah tangga pada Kelompok Kontrol dan perubahannya selama periode tahun 2009 dan 2012 seperti yang disajikan pada Tabel 4.15. dan Tabel 4.16.

Tabel 4.15. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga Kelompok Kontrol (Nominal)

Baseline		Impact			
Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Tidak Miskin	(%)
36	100	33	91,67	3	8,33

Sumber : Data primer. Telah diolah

Jumlah rumah tangga Miskin pada Kelompok Kontrol tahun 2009 adalah 36 dan pada tahun 2012 turun menjadi 32 atau mengalami penurunan **8,33%**. Apabila memperhitungkan tingkat inflasi selama kurun waktu 2010 hingga Agustus 2012 sebesar 14%, maka jumlah rumah tangga miskin turun menjadi 32, atau mengalami penurunan sebesar 8,33%. Perubahan tingkat kemiskinan sama apabila dihitung secara nominal dan riil.

Tabel 4.16. Perubahan Status Tiap Rumah Tangga Kelompok Kontrol (Riil)

Baseline		Impact			
Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Miskin	(%)	Jumlah RT Tidak Miskin	(%)
36	100	33	91,67	3	8,33

Sumber : Data primer. Telah diolah.

4.4.4. Perhitungan Dampak dengan Menggunakan Kelompok Kontrol

Setelah perhitungan selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum dan setelah periode intervensi kegiatan Pinjaman Bergulir program PUAP, tahap berikutnya adalah menghitung selisih antara selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Aksi dengan selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada Kelompok Kontrol. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui adanya dampak kegiatan Pinjaman Bergulir program PUAP pada Kelompok Aksi dan besaran dampak yang diakibatkan oleh adanya intervensi program tersebut.

4.4.4.1. Perbandingan Perubahan Pendapatan Per kapita Per bulan Kelompok Aksi Dan Kelompok Kontrol

Penghitungan selisih rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebelum (*baseline* tahun 2009) dan sesudah intervensi (*impact* tahun 2012) kegiatan Pinjaman Bergulir program PUAP dapat dilihat pada Tabel 4.17. Dari hasil penghitungan tersebut diperoleh rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga pada Kelompok Aksi setelah adanya intervensi program (tahun 2012) secara nominal **14,66%** lebih besar daripada rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga pada Kelompok Kontrol.

Tabel 4.17. Perbandingan Perubahan Rata-rata Pendapatan Per kapita Per bulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Nominal)

Kelompok	Baseline (Rp.)	Impact (Rp)	Perubahan (Rp.)	Perubahan (%)
Aksi	81.924	144.576	62.653	76,48
Kontrol	80.451	130.185	49.734	61,82
Selisih			12.919	14,66

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Sedangkan secara riil, dengan memasukkan inflasi efektif dari tahun 2010 hingga Agustus 2012 sebesar 14% (BPS) dapat dilihat perbedaan rata-rata pendapatan per kapita per bulan pada tahun 2009 (*baseline*) dan pada tahun 2012 (*impact*) pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol sebagaimana pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Perbandingan Perubahan Rata-rata Pendapatan Per kapita Per bulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol (Riil)

Kelompok	Baseline (Rp.)	Impact (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Perubahan (%)
Aksi	81.924	126.821	44.898	54,80
Kontrol	80.451	114.198	33.746	41,95
Selisih			11.151	12,86

Sumber: Data primer. Telah diolah.

Secara riil, rata-rata pendapatan per kapita per bulan rumah tangga baik pada Kelompok Aksi maupun Kelompok Kontrol mengalami peningkatan, namun pada Kelompok Aksi peningkatannya lebih besar 12,86% dibandingkan dengan Kelompok Kontrol. Dengan demikian kegiatan Pinjaman Bergulir program PUAP di Gapoktan Rukun Tani mempunyai dampak positif sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya tingkat pendapatan rumah tangga petani miskin penerima manfaat program, dengan besaran dampak sebesar **12,86%**.

4.4.4.2. Perbandingan Perubahan Status Kemiskinan dan Pergeseran Status Kemiskinan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Dengan mempertimbangkan Garis Kemiskinan Jawa Barat tahun 2009 sebesar Rp. 175.193,- dan Garis Kemiskinan Jawa Barat tahun 2012 sebesar Rp. 216.610,- perbandingan perubahan jumlah rumah tangga petani miskin pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol disajikan dalam Tabel 4.19.

Tabel. 4.19. Perbandingan Perubahan Tingkat Kemiskinan pada Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

Kelompok	Baseline	Impact	Pengurangan Kemiskinan
	Jumlah RT Miskin	Jumlah RT Miskin	
Aksi	100%	84%	16%
Kontrol	100%	91,67%	8,33%
			7,67%

Sumber : Data primer. Telah diolah

Sebelum mendapat intervensi program Pinjaman Bergulir dari program PUAP tingkat kemiskinan di Kelompok Aksi sama dengan tingkat kemiskinan pada Kelompok Kontrol. Setelah adanya intervensi program tingkat kemiskinan

pada Kelompok Aksi mengalami penurunan sebesar 16% dan Kelompok Kontrol mengalami penurunan kemiskinan sebesar 8,33%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah intervensi program penurunan kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat lebih besar 7,67% dibanding dengan rumah tangga bukan penerima manfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan Pinjaman Bergulir Program PUAP memberikan dampak positif terhadap penurunan kemiskinan pada rumah tangga penerima manfaat, dengan besaran dampak sebesar **7,67%**.

4.4.5. Uji t-Statistik

Hasil uji t-statistik terhadap pendapatan perkapita perbulan sebelum dan setelah program PUAP menunjukkan hasil yang nyata pada kelompok aksi maupun pada kelompok kontrol. Hal ini dapat terlihat dari Tabel 4.20 nilai p value baik pengujian beda rata-rata pada kelompok aksi dan pada kelompok kontrol memiliki nilai kurang dari alpha 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara pendapatan sebelum dilaksanakan program PUAP (Tahun 2009) dan setelah dilaksanakan program PUAP (Tahun 2012) baik pada kelompok aksi maupun pada kelompok kontrol.

Tabel 4.20. Uji t-Statistik Terhadap Pendapatan Perkapita Perbulan Nominal

No.	Kelompok	Mean Pendapatan		P value	Ket
		Sebelum PUAP	Sesudah PUAP		
1.	Aksi	81.923	144.576	0,000	N
2.	Kontrol	80.451	130.185	0,000	N

Keterangan : TN = Tidak Berbeda Nyata; N = Berbeda Nyata
Sumber : Data primer. Telah diolah

Tabel 4.21. Uji t-Statistik Terhadap Pendapatan Perkapita Perbulan Riil

No.	Kelompok	Mean Pendapatan		P value	Ket
		Sebelum PUAP	Sesudah PUAP		
1.	Aksi	81.923	126.821	0,000	N
2.	Kontrol	80.451	114.197	0,000	N

Keterangan : TN = Tidak Berbeda Nyata; N = Berbeda Nyata
Sumber : Data primer. Telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.20. dan Tabel 4.21, disimpulkan bahwa pendapatan sebelum dan setelah program PUAP pada kelompok aksi maupun pada kelompok kontrol berbeda nyata (nominal dan riil). Artinya, pendapatan setelah program PUAP pada kelompok aksi dan kelompok kontrol relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sebelum PUAP. Hal ini disebabkan karena terjadinya inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor yang meningkat setiap tahunnya, sehingga berimplikasi kepada peningkatan pendapatan perkapita perbulan bagi penduduk di Kabupaten Bogor.

Namun, jika dilihat dari perbandingan rata-rata pendapatan perkapita perbulan antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol sesudah adanya program PUAP, ternyata pendapatan perkapita perbulan kelompok aksi dan kelompok kontrol tidak berbeda nyata. Hasil pengujian t-statistik lebih jelas disajikan pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22. Uji t-Statistik Terhadap Perbedaan Pendapatan Perkapita Perbulan Kelompok Aksi dan Kelompok Kontrol

No.	Pendapatan	Mean Pendapatan Perkapita		P value	Ket
		Kelmp. Aksi	Kelomp. Kontrol		
1.	Nominal	144.576	130.185	0,896	TN
2.	Riil	126.821	114.197	0,896	TN

Keterangan : TN = Tidak Berbeda Nyata; N = Berbeda Nyata
Sumber : Data primer. Telah diolah

Berdasarkan hasil uji t-statistik pada Tabel 4.22. disampaikan bahwa program PUAP dinilai belum berhasil atau belum berjalan dengan baik karena berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan setelah dilaksanakan program PUAP antara pendapatan perkapita perbulan petani anggota PUAP (kelompok aksi) dan petani bukan anggota PUAP (kelompok kontrol). Dengan demikian, tujuan dari diadakannya program PUAP belum tercapai. Hal ini dikarenakan karakteristik petani miskin di Desa Citapen masih memiliki kendala di dalam keterbatasan sumber daya manusia dan juga masih lemahnya akses lahan bagi petani kecil.

Seperti yang telah diuraikan pada karakteristik responden petani miskin di Desa Citapen, terlihat latar belakang pendidikan sebagian besar petani adalah lulus SD dan tidak lulus SD. Rendahnya tingkat pendidikan petani berimplikasi

pada kemampuan petani tidak memadai di dalam pengembangan produksi pertanian maupun agribisnis secara keseluruhan. Selain itu masih rendahnya akses petani terhadap penggunaan lahan ikut mempengaruhi kesuksesan program PUAP. Karakteristik responden yang sebagian besar petani hanya mengelola lahan yang relatif sempit (kurang dari 0,5 Ha), menyebabkan keluaran output hasil pertaniannya sedikit dan kegiatan produksi tidak efisien. Kegiatan produksi pertanian yang sangat tergantung iklim, kualitas sumber daya manusia yang rendah, akses terhadap penggunaan lahan rendah, skala usaha yang sangat kecil, dan juga penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi rendah. Sehingga diperlukan ketepatan dan kecermatan dalam merumuskan strategi untuk perbaikan program PUAP kedepannya.

4.5. Keterbatasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua indikator kinerja kegiatan pinjaman bergulir dana PUAP ini diukur. Penulis membatasi pengukuran pada evaluasi dampak kegiatan pinjaman bergulir dana PUAP terhadap kinerja gapoktan dan tingkat pendapatan rumah tangga penerima manfaat (petani miskin). Penulis juga membatasi daerah penelitian di Gapoktan Rukun Tani di Desa Citapen, sehingga sampel yang digunakan terbatas jumlahnya. Jumlah sampel yang cukup kecil (kurang dari 100 responden) belum menggambarkan kondisi secara luas, jumlah responden dalam jumlah besar tentunya akan diperoleh gambaran yang lebih nyata.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana diungkapkan pada Bab Pendahuluan serta hasil dari proses olah data, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani telah berjalan baik. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah anggota yang menerima dana PUAP, Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahun 2011 yang meningkat (10,37% dari dana awal PUAP), dan juga tingkat pengembalian kredit macet yang relatif kecil (6,85% dari dana PUAP). Kendala yang dihadapi para anggota gapoktan adalah terjadinya gagal panen. Kurangnya pengetahuan dan teknologi mengenai budidaya pertanian menyebabkan produktifitas hasil pertanian tidak maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dari pengurus dan adanya rangkap jabatan antar kelembagaan menyebabkan pengurus gapoktan tidak fokus didalam pengembangan unit-unit usaha lainnya.
2. Aspek kinerja dan kualitas kinerja Gapoktan Rukun Tani yang dinilai perlu dilakukan peningkatan kinerja adalah adanya rencana kerja gapoktan, penyelenggaraan rapat/pertemuan anggota, gapoktan belum memiliki badan hukum, waktu dan realisasi pinjaman, analisa kelayakan usaha, pelaporan yang dibuat pengurus gapoktan, pembinaan usaha anggota, adanya pengawasan dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana, dan peran penyuluh pendamping. Aspek kerjasama keuangan dengan lembaga keuangan lain sebagian besar petani menganggap tidak penting. Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran petani akan pentingnya pengembangan modal usaha gapoktan bagi keberlanjutan peran gapoktan sebagai lembaga ekonomi pedesaan. Hal ini didukung data laporan neraca yang menunjukkan dana keswadayaan dari anggota masih relatif kecil sebesar Rp. 11.020.000,- atau sebesar 10% dari jumlah aktiva gapoktan rukun tani.

3. Dampak pelaksanaan program PUAP mengakibatkan peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga petani penerima manfaat sebesar 12,86% dan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7,67%. Hal ini menunjukkan adanya dampak positif program PUAP terhadap pendapatan penerima manfaat. Dan jika dilakukan uji beda rata-rata terhadap pendapatan setelah program PUAP antara kelompok anggota PUAP (kelompok aksi) dengan kelompok non anggota PUAP (kelompok kontrol) dihasilkan tidak berbeda nyata. Hal ini dikarenakan karena kegiatan produksi pertanian yang sangat tergantung iklim, kualitas sumber daya manusia yang rendah, akses terhadap penggunaan lahan rendah, skala usaha yang sangat kecil, dan juga penggunaan teknologi yang masih sangat sederhana menyebabkan kualitas dan kuantitas produksi rendah. Sehingga diperlukan ketepatan dan kecermatan dalam merumuskan strategi untuk perbaikan program PUAP kedepannya.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran dari penulis terhadap pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir program PUAP adalah :

Bagi Pengurus Gapoktan Rukun Tani

1. Perlu meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan dalam hal pengajuan pinjaman oleh petani sampai pemanfaatan dan pengembalian dana ke LKM-A.
2. Perlu pengaktifan kembali pengurus gapoktan, khususnya untuk seksi-seksi unit usaha yang ada di Gapoktan Rukun Tani dengan cara melakukan rapat/pertemuan pengurus secara berkala dan juga peningkatan kinerja gapoktan yakni dengan melengkapi persyaratan administrasi badan hukum gapoktan, membuat rencana kerja yang jelas dan berkelanjutan, diaktifkan kembali peran komite pengawas pembiayaan serta peningkatan sarana dan pra sarana di Gapoktan Rukun Tani.

Bagi Pemerintah Kabupaten Bogor

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara rutin.
2. Mensosialisasikan pentingnya pengembangan gapoktan sebagai lembaga ekonomi pedesaan untuk kepentingan memajukan kesejahteraan masyarakat di pedesaan dengan meningkatkan modal keswadayaan dan menjembatani hubungan antara gapoktan dengan Perbankan dan Swasta.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak akademisi dan lembaga penelitian untuk penerapan teknologi pertanian.

Bagi Pemerintah

1. Program PUAP selain bantuan modal usaha juga hendaknya juga memperhatikan kemudahan akses penggunaan lahan bagi petani miskin.
2. Melakukan pembinaan dan pelatihan tentang manajemen organisasi dan budidaya pertanian kepada anggota gapoktan PUAP secara intensif.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada gapoktan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah yang muncul dari pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir di lapangan dan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan.
4. Diaktifkannya peran penyuluh pendamping gapoktan, karena pengurus gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan di dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal administrasi maupun dalam hal budidaya usaha tani tanaman pangan dan hortikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan berkelanjutan.

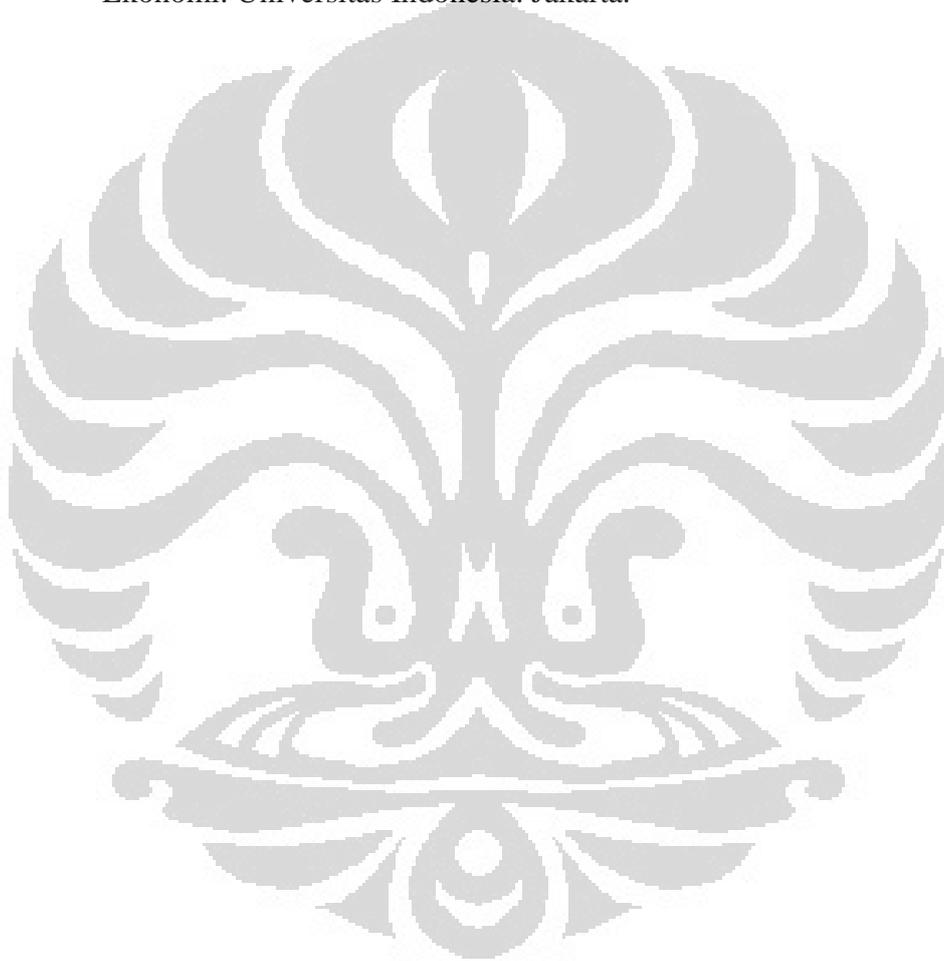
DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. (2011). *Strategi Keberlanjutan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Kasus Kabupaten Karawang)*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Artiningtyas. (2012). *Analisis Tingkat Keberhasilan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Berdasarkan Tingkat Konsumsi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang)*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bappeda Kab. Bogor. (2011). *Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kab. Bogor Tahun 2008 – 2013*. Bogor.
- Bappenas. (2004). *Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta www.bappenas.go.id/get-file-server/node/161
- BPS Kab. Bogor. (2011). *Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2011*. Bogor.
- BPS Prov. Jabar. (2012). *Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Maret 2012*. Berita Resmi Statistik No. 31/07/32/Th. XIV, 2 Juli 2012. Bandung. www.jabar.bps.go.id/system/files_force/publikasi/miskin072012_0.pdf
- BPS Pusat. (2012). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia*. Jakarta. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1
- BPS Pusat. (2012). *Tingkat Kemiskinan Jawa Barat Maret 2009*. Berita Resmi Statistik No. 27/07/32/Th. XI, 1 Juli 2009. Jakarta. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1
- BP4K Kab. Bogor. (2011). *Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. www.bp4kkabbogor.com
- Caesarion, Rio. (2011). *Efektifitas Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kabupaten Lampung Selatan*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Chandra, Rama. (2010). *Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dampaknya terhadap Peserta Program*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Chatani, Kazutoshi. (2012). *Diagnosing The Indonesian Economy : Toward Inclusive and Green Growth. Chapter 9 : Economic Growth Employment Creation, and Poverty Alleviation*. Penerbit Anthem Press.

- Desa Cibedug. (2009). *Dokumen Jangka Panjang Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)*. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Bogor.
- Desa Citapen. (2009). *Dokumen Jangka Panjang Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)*. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Bogor.
- Desa Citapen. (2010). *Potensi Desa Citapen Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Tahun 2010*. Bogor.
- Gardiner dkk. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Modul 3 : Target, Indikator dan Basis Data. Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id
- Ginting, J. (2004). *Analisis Faktor Penyebab Pendapatan Petani Miskin di Kecamatan Deli Tua*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Habibillah, Ahmad Darma. (2010). *Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Penguatan Modal (DPM APBN TA. 2006) melalui Mekanisme Pinjaman bagi Pembudidaya Ikan Skala Kecil di Kota Metro*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ismawan, Bambang. (2003). *Peran Lembaga Keuangan Mikro*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Janvry, Alain de. (2004). *Handout#10: Rural Development Policy and Household and Community Behaviour*. <http://are.berkeley.edu/courses/ARE253/2004/handouts/PP04-10-peasants.pdf>
- Kementerian Pertanian. (2009). *Informasi Anggaran Departemen Pertanian Tahun 2009*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta. Berita Pertanian Online www.deptan.go.id.
- Kementerian Pertanian. (2011). *Pedoman Umum Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2010). *Petunjuk Teknis Pemingkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Martilla, John A and James, John C. (1977). *Importance-Performance Analysis*. *Journal of Marketing*, Vol. 41, No. 1, pp. 77-79. American Marketing Association. <http://www.jstor.org/stable/1250495>.
- Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia. Cetakan Keempat.

- Nuryana, Mu'man. (2012). *Program Evaluation. Kementerian Sosial*.
www.kemsos.go.id/modules.php?name=Downloads&d_op...
- Pasaribu, Ali Musa. (2012). *Perencanaan & Evaluasi Proyek Agribisnis (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta. Lily Publisher.
- Pasaribu dkk. (2011). *Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Mahaga, Radiana. (2009). *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Tahap 2 (P2KP-2) di Jawa Barat terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ravallion et al. (2005). *What Can Ex-Participants Reveal about a Program's Impact?*. The Journal of Human Resources, Vol. 40, No. 1. University of Wisconsin Press. www.jstor.org/stabel/4129571
- Ruslan, Kadir. (2011). *Pemberitaan KOMPAS.com "ADB: Penduduk Miskin Indonesia Bertambah" Keliru*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan. <http://tapanuliutarakab.bps.go.id/?q=node/47>
- Santosa, Hidayat, dan Indroyono. (2003). *Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan Bersasaran di Propinsi D.I. Jogjakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vo. 18, No. 2 Hal. 144 – 160. Univeritas Gadjah Mada. Yogyakarta.
<http://jieb.feb.ugm.ac.id/catalog/index.php/jieb/article/view/605>
- Soekartawi et al. (1986). *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian untuk Perkembangan Petani Kecil*. Jakarta. UI-Press.
- Soekartawi. (1995). *Analisis Usaha Tani*. Jakarta. UI-Press.
- Sulistyo, Joko. (2012). *6 Hari Jago SPSS 17*. Jakarta. Cakrawala.
- Suprpto, Ato. (2008). *Eksekutif Bertangan Dingin*. Jakarta. Yayasan Agrindo Mandiri.
- Suryahadi, Asep. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Modul 4 : Persyaratan dan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik. Bappenas. Jakarta.
www.ditpk.bappenas.go.id
- Syahyuti. (2007). *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Pedesaan*. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 No. 1 : 15 – 35. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.

- Wang, Ray dan Tseng, Ming-Lang. (2011). *Evaluation of International Student Satisfaction using Fuzzy Importance-Performance Analysis*. *Procedia – Social and Behavioral Science* 25, 438 – 446. Elsevier Ltd. SciVerse ScienceDirect.
- Wijaya, Toni. (2011). *Manajemen Kualitas Jasa. Desain Servqual, QFD, dan Kano Disertai Contoh Aplikasi dalam Kasus Penelitian*. Jakarta. PT. Indeks.
- Wedar, Mas. (2011). *Konsep Ekonomi Pembangunan. Bahan Ajar Mata Kuliah Perencanaan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.



Lampiran 1. Kuisisioner Anggota Gapoktan Penerima Program PUAP

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Penerima Dana PUAP

Nama Responden :

RT/RW :

Usia :

Pendidikan :

Nama kelompok tani :

Komoditas Utama : 1. (....Ha)

2. (....Ha)

3. (....Ha)

Status Kepemilikan :

Jumlah Tanggungan Keluarga : orang

(termasuk dirinya sendiri)

Pendapatan (Baseline) :

1. Luas kepemilikan lahan

a. < 0,1 Ha

b. 0,1 – 0,5 Ha

c. 0,6 – 1 Ha

d. > 1 Ha

2. Lama pengalaman bertani

a. < 5 tahun

b. 6 – 10 tahun

c. 11 – 15 tahun

d. > 15 tahun

3. Status Kepemilikan Lahan

a. Pribadi

b. Sewa

c. Bagi Hasil

d. Lainnya

4. Status usaha tani
 - a. Komoditas tanaman pangan
 - b. Komoditas hortikultura
 - c. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura

II. Aspek Kinerja Gapoktan

2.1. Tingkat Kepentingan

No	Daftar Pertanyaan	Sangat Penting	Penting	Cukup Penting	Kurang Penting	Tidak Penting
A	Aspek Organisasi					
1	Gapoktan memiliki AD/ART					
2	Gapoktan melakukan pemisahan pengurus Gapoktan dan Pengelola LKMA					
3	Gapoktan mempunyai rencana kerja					
4	Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus					
5	Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu					
6	Gapoktan memiliki berbadan hukum					
B	Aspek Pengelolaan Dana PUAP					
1	Sosialisasi program PUAP					
2	Kemudahan persyaratan penerima PUAP					
3	Waktu realisasi pinjaman					
4	Pencatatan dan pembukuan					
5	Analisa kelayakan usaha					
6	Pelaporan yang dibuat pengurus Gapoktan					
7	Pembinaan usaha anggota					
8	Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan					
9	Insentif dan sanksi					
10	Sarana dan Prasarana					
C	Aspek Usaha Agribisnis					
1	Gapoktan menyediakan saprodi pertanian					
2	Adanya peran penyuluh pendamping					
3	Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan					
4	Pemasaran bersama dilakukan oleh Gapoktan					

Lampiran 1 (lanjutan)

2.2. Tingkat Kepuasan

No	Daftar Pertanyaan	Sangat Puas	Puas	Cukup Puas	Kurang Puas	Tidak Puas
A	Aspek Organisasi					
1	Gapoktan memiliki AD/ART					
2	Gapoktan melakukan pemisahan pengurus Gapoktan dan Pengelola LKMA					
3	Gapoktan mempunyai rencana kerja					
4	Gapoktan menyelenggarakan rapat/pertemuan pengurus					
5	Gapoktan melaksanakan RAT tepat waktu					
6	Gapoktan memiliki berbadan hukum					
B	Aspek Pengelolaan Dana PUAP					
1	Sosialisasi program PUAP					
2	Kemudahan persyaratan penerima PUAP					
3	Waktu realisasi pinjaman					
4	Pencatatan dan pembukuan					
5	Analisa kelayakan usaha					
6	Pelaporan yang dibuat pengurus Gapoktan					
7	Pembinaan usaha anggota					
8	Adanya pengawasan dalam hal pembiayaan					
9	Insentif dan sanksi					
10	Sarana dan Prasarana					
C	Aspek Usaha Agribisnis					
1	Gapoktan menyediakan saprodi pertanian					
2	Adanya peran penyuluh pendamping					
3	Gapoktan mengadakan kerjasama keuangan					
4	Pemasaran bersama dilakukan oleh Gapoktan					

III. Aspek Tingkat Pendapatan Usaha Tani
Satu Kali Musim Tanam

Analisa Usaha Tani			
I. Penerimaan	Volume	Harga	Total
Produksi (Kg)			
Total Penerimaan (A)			
II. Biaya			
Benih			
Pupuk			
- Urea			
- ZA			
- TSP			
- KCL			
- NPK			
- Phonska			
- Kandang			
- Pupuk alternatif			
- Pestisida/Herbisida			
- Lain-lain			
Tenaga Kerja			
- Pengolahan Tanah			
- Ternak			
- Traktor			
- Tenaga Kerja Manusia			
- Persemaian dan Pembibitan			
- Penanaman			
- Pemupukan			
- Penyiang/pemangkasan			
- Penyemprotan			
- Panen			
- Pasca Panen			
.....			
....			
lainnya			
Total Biaya (B)			
Pendapatan Bersih (A-B)			

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Penerima Dana PUAP

Nama Responden :

RT/RW :

Usia :

Tingkat Pendidikan :

Komoditas Utama : 1. (....Ha)

2. (....Ha)

3. (....Ha)

Jumlah Tanggungan Keluarga : orang
(termasuk dirinya sendiri)

Pendapatan (Baseline) :

1. Luas kepemilikan lahan

a. < 0,1 Ha

b. 0,1 – 1 Ha

c. 1 – 2 Ha

d. > 2 Ha

2. Lama pengalaman bertani

a. < 5 tahun

b. 6 – 10 tahun

c. 11 – 15 tahun

d. > 15 tahun

3. Status Kepemilikan Lahan

a. Pribadi

b. Sewa

c. Bagi Hasil

d. Lainnya

4. Status usaha tani
 - a. Komoditas tanaman pangan
 - b. Komoditas hortikultura
 - c. Komoditas tanaman pangan dan hortikultura

II. Aspek Tingkat Pendapatan Usaha Tani

Satu Kali Musim Tanam

Analisa Usaha Tani			
I. Penerimaan	Volume	Harga	Total
Produksi (Kg)			
Total Penerimaan (A)			
II. Biaya			
Benih			
Pupuk			
- Urea			
- ZA			
- TSP			
- KCL			
- NPK			
- Phonska			
- Kandang			
- Pupuk alternatif			
- Pestisida/Herbisida			
- Lain-lain			
Tenaga Kerja			
- Pengolahan Tanah			
Ternak			
Traktor			
Tenaga Kerja Manusia			
- Persemaian dan Pembibitan			
- Penanaman			
- Pemupukan			
- Penyiangan/pemangkasan			
- Penyemprotan			
- Panen			
- Pasca Panen			
.....			
....			
lainnya			
Total Biaya (B)			
Pendapatan Bersih (A-B)			

Lampiran 3. Hasil Output SPSS versi 17 : Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Hasil Uji Validitas Tingkat Kepentingan Responden

		Correlations																				
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	Total
A1	Pearson Correlation	1	.898**	1.000**	.581**	.388	.250	.500*	.707**	.707**	.308	.000	.500*	.000	.354	.273	.273	.000	.000	.184	.000	.663**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.055	.228	.011	.000	.000	.135	1.000	.011	1.000	.083	.187	.187	1.000	1.000	.378	1.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A2	Pearson Correlation	.898**	1	.898**	.512**	.502*	.225	.449*	.635**	.635**	.243	.206	.449*	.171	.635**	.451*	.451*	-.056	-.062	.192	.180	.724**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.009	.011	.281	.024	.001	.001	.241	.324	.024	.414	.001	.024	.024	.790	.770	.358	.390	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A3	Pearson Correlation	1.000**	.898**	1	.581**	.388	.250	.500*	.707**	.707**	.308	.000	.500*	.000	.354	.273	.273	.000	.000	.184	.000	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.002	.055	.228	.011	.000	.000	.135	1.000	.011	1.000	.083	.187	.187	1.000	1.000	.378	1.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A4	Pearson Correlation	.581**	.512**	.581**	1	.424*	.581**	.291	.411*	.411*	.315	.266	.291	-.019	.000	.583**	.583**	.186	.169	.249	.232	.654**
	Sig. (2-tailed)	.002	.009	.002		.035	.002	.159	.041	.041	.125	.198	.159	.927	1.000	.002	.002	.372	.418	.231	.263	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A5	Pearson Correlation	.388	.502*	.388	.424*	1	.388	.388	.274	.274	.392	.534**	.388	.283	.274	.534**	.534**	.201	.173	.069	.272	.676**
	Sig. (2-tailed)	.055	.011	.055	.035		.055	.055	.184	.184	.053	.006	.055	.171	.184	.006	.006	.337	.408	.744	.189	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A6	Pearson Correlation	.250	.225	.250	.581**	.388	1	.250	.354	.354	.308	.273	.000	.000	.000	.273	.273	.223	.214	.000	.250	.464*
	Sig. (2-tailed)	.228	.281	.228	.002	.055		.228	.083	.083	.135	.187	1.000	1.000	1.000	.187	.187	.285	.303	1.000	.228	.019
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B1	Pearson Correlation	.500*	.449*	.500*	.291	.388	.250	1	.707**	.707**	.000	.000	.000	.000	.354	.273	.273	.445*	.214	.000	.250	.552**
	Sig. (2-tailed)	.011	.024	.011	.159	.055	.228		.000	.000	1.000	1.000	1.000	1.000	.083	.187	.187	.026	.303	1.000	.228	.004
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B2	Pearson Correlation	.707**	.635**	.707**	.411*	.274	.354	.707**	1	1.000**	.000	.000	.354	.000	.500*	.386	.386	.315	.303	.000	.354	.687**

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.041	.184	.083	.000	.000	1.000	1.000	.083	1.000	.011	.057	.057	.125	.141	1.000	.083	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B3	Pearson Correlation	.707**	.635**	.707**	.411*	.274	.354	.707**	1.000**	1	.000	.000	.354	.000	.500*	.386	.386	.315	.303	.000	.354	.687**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.041	.184	.083	.000	.000	1.000	1.000	.083	1.000	.011	.057	.057	.125	.141	1.000	.083	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B4	Pearson Correlation	.308	.243	.308	.315	.392	.308	.000	.000	.000	1	.510**	.308	.448*	.000	.175	.175	.044	.274	.336	-.185	.447*
	Sig. (2-tailed)	.135	.241	.135	.125	.053	.135	1.000	1.000	1.000	.009	.135	.025	1.000	.404	.404	.835	.184	.101	.377	.025	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B5	Pearson Correlation	.000	.206	.000	.266	.534**	.273	.000	.000	.000	.510**	1	.273	.831**	.386	.702**	.702**	.214	.168	.330	.327	.601**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.324	1.000	.198	.006	.187	1.000	1.000	1.000	.009	.187	.000	.057	.000	.000	.305	.421	.107	.110	.001	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B6	Pearson Correlation	.500*	.449*	.500*	.291	.388	.000	.000	.354	.354	.308	.273	1	.414*	.354	.273	.273	-.223	.000	.000	.000	.464*
	Sig. (2-tailed)	.011	.024	.011	.159	.055	1.000	1.000	.083	.083	.135	.187	.040	.083	.187	.187	.285	1.000	1.000	1.000	.019	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B7	Pearson Correlation	.000	.171	.000	-.019	.283	.000	.000	.000	.000	.448*	.831**	.414*	1	.585**	.379	.379	.081	.064	.201	.124	.438*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.414	1.000	.927	.171	1.000	1.000	1.000	1.000	.025	.000	.040	.002	.062	.062	.700	.762	.335	.554	.029	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B8	Pearson Correlation	.354	.635**	.354	.000	.274	.000	.354	.500*	.500*	.000	.386	.354	.585**	1	.386	.386	.000	.000	.000	.354	.531**
	Sig. (2-tailed)	.083	.001	.083	1.000	.184	1.000	.083	.011	.011	1.000	.057	.083	.002	.057	.057	1.000	1.000	1.000	.083	.006	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B9	Pearson Correlation	.273	.451*	.273	.583**	.534**	.273	.273	.386	.386	.175	.702**	.273	.379	.386	1	1.000**	.214	.168	.330	.600**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.187	.024	.187	.002	.006	.187	.187	.057	.057	.404	.000	.187	.062	.057	.000	.305	.421	.107	.002	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
B10	Pearson Correlation	.273	.451*	.273	.583**	.534**	.273	.273	.386	.386	.175	.702**	.273	.379	.386	1.000**	1	.214	.168	.330	.600**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.187	.024	.187	.002	.006	.187	.187	.057	.057	.404	.000	.187	.062	.057	.000	.305	.421	.107	.002	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
C1	Pearson Correlation	.000	-.056	.000	.186	.201	.223	.445*	.315	.315	.044	.214	-.223	.081	.000	.214	.214	1	.718**	.348	.579**	.440*
	Sig. (2-tailed)	1.000	.790	1.000	.372	.337	.285	.026	.125	.125	.835	.305	.285	.700	1.000	.305	.305	.000	.088	.002	.028	

N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C2 Pearson Correlation	.000	-.062	.000	.169	.173	.214	.214	.303	.303	.274	.168	.000	.064	.000	.168	.168	.718**	1	.360	.514**	.433*
C2 Sig. (2-tailed)	1.000	.770	1.000	.418	.408	.303	.303	.141	.141	.184	.421	1.000	.762	1.000	.421	.421	.000		.077	.009	.031
C2 N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C3 Pearson Correlation	.184	.192	.184	.249	.069	.000	.000	.000	.000	.336	.330	.000	.201	.000	.330	.330	.348	.360	1	.332	.425*
C3 Sig. (2-tailed)	.378	.358	.378	.231	.744	1.000	1.000	1.000	1.000	.101	.107	1.000	.335	1.000	.107	.107	.088	.077		.105	.034
C3 N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C4 Pearson Correlation	.000	.180	.000	.232	.272	.250	.250	.354	.354	-.185	.327	.000	.124	.354	.600**	.600**	.579**	.514**	.332	1	.539**
C4 Sig. (2-tailed)	1.000	.390	1.000	.263	.189	.228	.228	.083	.083	.377	.110	1.000	.554	.083	.002	.002	.002	.009	.105		.005
C4 N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Total Pearson Correlation	.663**	.724**	.663**	.654**	.676**	.464*	.552**	.687**	.687**	.447*	.601**	.464*	.438*	.531**	.745**	.745**	.440*	.433*	.425*	.539**	1
Total Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.019	.004	.000	.000	.025	.001	.019	.029	.006	.000	.000	.028	.031	.034	.005	
Total N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

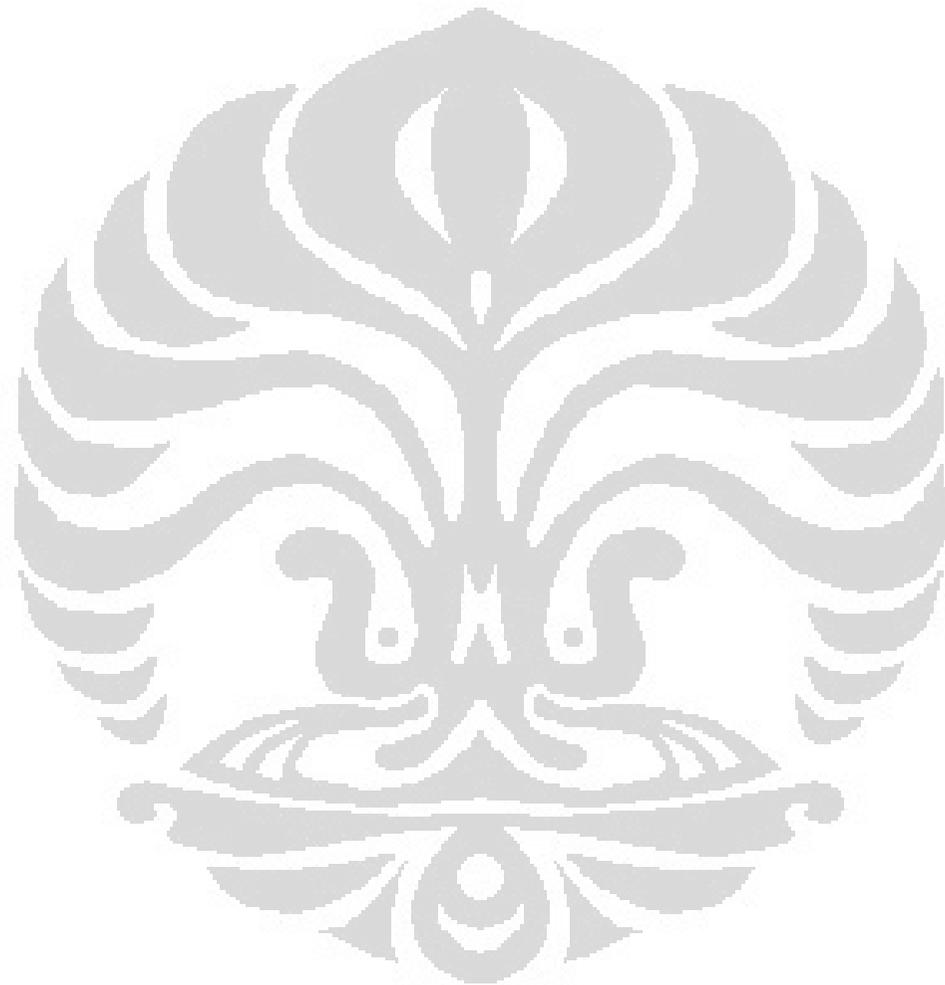
** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepentingan Responden

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.886	20



3. Hasil Uji Validitas Tingkat Kepuasan Responden

		Correlations																				
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	C1	C2	C3	C4	Total
A1	Pearson Correlation	1	.196	.404*	.544**	.142	.497*	.258	.114	.201	.088	.215	.201	.084	.250	.257	.088	1.000**	.201	.230	1.000**	.673**
	Sig. (2-tailed)		.347	.045	.005	.499	.011	.213	.587	.335	.677	.302	.335	.691	.229	.215	.675	.000	.335	.268	.000	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A2	Pearson Correlation	.196	1	.286	.402*	.036	.443*	.021	-.052	.168	.121	.127	.168	.343	.269	.098	.305	.196	.168	.223	.196	.451*
	Sig. (2-tailed)	.347		.166	.046	.863	.026	.919	.805	.421	.563	.544	.421	.093	.194	.641	.139	.347	.421	.284	.347	.024
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A3	Pearson Correlation	.404*	.286	1	.228	.259	.273	.366	.209	.460*	.239	.048	.460*	.238	.359	.240	.329	.404*	.460*	.031	.404*	.598**
	Sig. (2-tailed)	.045	.166		.272	.211	.186	.072	.316	.021	.251	.819	.021	.252	.078	.249	.108	.045	.021	.882	.045	.002
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A4	Pearson Correlation	.544**	.402*	.228	1	.167	.561**	.184	.174	-.042	.161	-.011	-.042	-.055	.119	.227	-.075	.544**	-.042	.663**	.544**	.519**
	Sig. (2-tailed)	.005	.046	.272		.424	.004	.378	.406	.843	.442	.958	.843	.796	.571	.276	.720	.005	.843	.000	.005	.008
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A5	Pearson Correlation	.142	.036	.259	.167	1	.101	.811**	.906**	.215	.469*	.236	.215	.106	.194	.261	.042	.142	.215	.008	.142	.476*
	Sig. (2-tailed)	.499	.863	.211	.424		.632	.000	.000	.301	.018	.256	.301	.615	.352	.207	.843	.499	.301	.969	.499	.016
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
A6	Pearson Correlation	.497*	.443*	.273	.561**	.101	1	.130	.113	.158	.285	.239	.158	.386	.161	.324	.287	.497*	.158	.359	.497*	.648**
	Sig. (2-tailed)	.011	.026	.186	.004	.632		.534	.589	.450	.168	.250	.450	.057	.441	.115	.165	.011	.450	.078	.011	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B1	Pearson Correlation	.258	.021	.366	.184	.811**	.130	1	.891**	.355	.469*	.456*	.355	-.042	.354	.248	.025	.258	.355	.124	.258	.578**
	Sig. (2-tailed)	.213	.919	.072	.378	.000	.534		.000	.082	.018	.022	.082	.843	.083	.231	.907	.213	.082	.554	.213	.002
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B2	Pearson Correlation	.114	-.052	.209	.174	.906**	.113	.891**	1	.174	.553**	.238	.174	.038	.157	.253	-.060	.114	.174	.061	.114	.445*

	Sig. (2-tailed)	.587	.805	.316	.406	.000	.589	.000		.406	.004	.252	.406	.857	.455	.222	.776	.587	.406	.773	.587	.026
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B3	Pearson Correlation	.201	.168	.460*	-.042	.215	.158	.355	.174	1	.161	.450*	1.000**	.400*	.901**	.144	.373	.201	1.000**	.142	.201	.641**
	Sig. (2-tailed)	.335	.421	.021	.843	.301	.450	.082	.406		.442	.024	.000	.048	.000	.491	.066	.335	.000	.499	.335	.001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B4	Pearson Correlation	.088	.121	.239	.161	.469*	.285	.469*	.553**	.161	1	.087	.161	.277	.120	.433*	.140	.088	.161	.233	.088	.470*
	Sig. (2-tailed)	.677	.563	.251	.442	.018	.168	.018	.004	.442		.678	.442	.180	.568	.030	.505	.677	.442	.262	.677	.018
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B5	Pearson Correlation	.215	.127	.048	-.011	.236	.239	.456*	.238	.450*	.087	1	.450*	.203	.488*	.104	.313	.215	.450*	.093	.215	.481*
	Sig. (2-tailed)	.302	.544	.819	.958	.256	.250	.022	.252	.024	.678		.024	.331	.013	.622	.127	.302	.024	.658	.302	.015
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B6	Pearson Correlation	.201	.168	.460*	-.042	.215	.158	.355	.174	1.000**	.161	.450*	1	.400*	.901**	.144	.373	.201	1.000**	.142	.201	.641**
	Sig. (2-tailed)	.335	.421	.021	.843	.301	.450	.082	.406	.000	.442	.024		.048	.000	.491	.066	.335	.000	.499	.335	.001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B7	Pearson Correlation	.084	.343	.238	-.055	.106	.386	-.042	.038	.400*	.277	.203	.400*	1	.306	.211	.724**	.084	.400*	-.115	.084	.456*
	Sig. (2-tailed)	.691	.093	.252	.796	.615	.057	.843	.857	.048	.180	.331	.048		.137	.312	.000	.691	.048	.585	.691	.022
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B8	Pearson Correlation	.250	.269	.359	.119	.194	.161	.354	.157	.901**	.120	.488*	.901**	.306	1	.180	.309	.250	.901**	.316	.250	.658**
	Sig. (2-tailed)	.229	.194	.078	.571	.352	.441	.083	.455	.000	.568	.013	.000	.137		.391	.132	.229	.000	.124	.229	.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B9	Pearson Correlation	.257	.098	.240	.227	.261	.324	.248	.253	.144	.433*	.104	.144	.211	.180	1	.261	.257	.144	.338	.257	.493*
	Sig. (2-tailed)	.215	.641	.249	.276	.207	.115	.231	.222	.491	.030	.622	.491	.312	.391		.207	.215	.491	.098	.215	.012
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
B10	Pearson Correlation	.088	.305	.329	-.075	.042	.287	.025	-.060	.373	.140	.313	.373	.724**	.309	.261	1	.088	.373	.068	.088	.448*
	Sig. (2-tailed)	.675	.139	.108	.720	.843	.165	.907	.776	.066	.505	.127	.066	.000	.132	.207		.675	.066	.747	.675	.025
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C1	Pearson Correlation	1.000**	.196	.404*	.544**	.142	.497*	.258	.114	.201	.088	.215	.201	.084	.250	.257	.088	1	.201	.230	1.000**	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000	.347	.045	.005	.499	.011	.213	.587	.335	.677	.302	.335	.691	.229	.215	.675		.335	.268	.000	.000

N		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
C2	Pearson Correlation	.201	.168	.460*	-.042	.215	.158	.355	.174	1.000**	.161	.450*	1.000**	.400*	.901**	.144	.373	.201	1	.142	.201	.641**
	Sig. (2-tailed)	.335	.421	.021	.843	.301	.450	.082	.406	.000	.442	.024	.000	.048	.000	.491	.066	.335		.499	.335	.001
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C3	Pearson Correlation	.230	.223	.031	.663**	.008	.359	.124	.061	.142	.233	.093	.142	-.115	.316	.338	.068	.230	.142	1	.230	.418*
	Sig. (2-tailed)	.268	.284	.882	.000	.969	.078	.554	.773	.499	.262	.658	.499	.585	.124	.098	.747	.268	.499		.268	.038
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
C4	Pearson Correlation	1.000**	.196	.404*	.544**	.142	.497*	.258	.114	.201	.088	.215	.201	.084	.250	.257	.088	1.000**	.201	.230	1	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000	.347	.045	.005	.499	.011	.213	.587	.335	.677	.302	.335	.691	.229	.215	.675	.000	.335	.268		.000
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Total	Pearson Correlation	.673**	.451*	.598**	.519**	.476*	.648**	.578**	.445*	.641**	.470*	.481*	.641**	.456*	.658**	.493*	.448*	.673**	.641**	.418*	.673**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.024	.002	.008	.016	.000	.002	.026	.001	.018	.015	.001	.022	.000	.012	.025	.000	.001	.038	.000	
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kepuasan

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.879	20

Lampiran 4. Hasil Output SPSS versi 17 : Uji t Beda Rata-Rata 2 Sampel Independen (sebelum intervensi program PUAP)

T-Test

Group Statistics

	Kelompok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pendapatan_perkapita_Baseline	Aksi	25	81923.84	16176.530	3235.306
	Kontrol	36	80451.44	30370.594	5061.766

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Pendapatan_perkapita_Baseline	Equal variances assumed	4.440	.039	.221	59	.826	1472.396	6655.875	-11845.980	14790.772
	Equal variances not assumed			.245	55.846	.807	1472.396	6007.385	-10562.575	13507.366

Lampiran 5. Pendapatan Perkapita Perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Aksi

No.	Jumlah Tanggungan Keluarga	Pend/ kapita /bulan Baseline	Pend/ kapita /bulan Impact		Status Kemiskinan		
			Nominal	Riil	Baseline	Impact Nominal	Impact Riil
1	6	66,667	121,042	106,177	Miskin	Miskin	Miskin
2	7	57,143	61,696	54,120	Miskin	Miskin	Miskin
3	5	80,000	128,950	113,114	Miskin	Miskin	Miskin
4	4	100,000	110,000	96,491	Miskin	Miskin	Miskin
5	4	100,000	120,458	105,665	Miskin	Miskin	Miskin
6	10	70,000	325,833	285,819	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
7	5	100,000	104,600	91,754	Miskin	Miskin	Miskin
8	5	120,000	298,333	261,696	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
9	5	80,000	135,667	119,006	Miskin	Miskin	Miskin
10	6	66,667	107,458	94,262	Miskin	Miskin	Miskin
11	6	83,333	265,556	232,943	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
12	5	80,000	88,950	78,026	Miskin	Miskin	Miskin
13	6	83,333	163,056	143,031	Miskin	Miskin	Miskin
14	7	57,143	73,333	64,327	Miskin	Miskin	Miskin
15	5	90,000	196,350	172,237	Miskin	Miskin	Miskin
16	5	80,000	92,500	81,140	Miskin	Miskin	Miskin
17	5	100,000	260,000	228,070	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
18	5	80,000	102,667	90,058	Miskin	Miskin	Miskin
19	3	100,000	191,944	168,372	Miskin	Miskin	Miskin
20	6	75,000	134,097	117,629	Miskin	Miskin	Miskin
21	4	100,000	122,969	107,867	Miskin	Miskin	Miskin
22	4	75,000	98,750	86,623	Miskin	Miskin	Miskin
23	6	66,667	90,528	79,410	Miskin	Miskin	Miskin
24	7	57,143	84,107	73,778	Miskin	Miskin	Miskin
25	5	80,000	135,567	118,918	Miskin	Miskin	Miskin
Rata-rata	5	81,924	144,576	126,821			

Lampiran 6. Pendapatan Perkapita Perbulan dan Status Kemiskinan Kelompok Kontrol

No.	Jumlah Tanggungan Keluarga	Pend/ kapita /bulan Baseline	Pend/ kapita /bulan		Status Kemiskinan		
			Nominal	Riil	Baseline	Impact Nominal	Impact Riil
1	5	80,000	87,767	76,988	Miskin	Miskin	Miskin
2	3	166,667	438,333	384,503	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
3	5	80,000	101,500	89,035	Miskin	Miskin	Miskin
4	7	57,143	56,714	49,749	Miskin	Miskin	Miskin
5	5	80,000	115,133	100,994	Miskin	Miskin	Miskin
6	5	100,000	105,300	92,368	Miskin	Miskin	Miskin
7	6	66,667	171,458	150,402	Miskin	Miskin	Miskin
8	6	50,000	97,222	85,283	Miskin	Miskin	Miskin
9	4	150,000	282,500	247,807	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
10	8	50,000	123,083	107,968	Miskin	Miskin	Miskin
11	7	64,286	91,179	79,981	Miskin	Miskin	Miskin
12	5	100,000	202,750	177,851	Miskin	Miskin	Miskin
13	6	66,667	117,083	102,705	Miskin	Miskin	Miskin
14	7	71,429	141,429	124,060	Miskin	Miskin	Miskin
15	8	37,500	57,292	50,256	Miskin	Miskin	Miskin
16	4	112,500	119,167	104,532	Miskin	Miskin	Miskin
17	4	75,000	163,438	143,366	Miskin	Miskin	Miskin
18	5	90,000	122,667	107,602	Miskin	Miskin	Miskin
19	6	83,333	126,944	111,355	Miskin	Miskin	Miskin
20	4	100,000	141,625	124,232	Miskin	Miskin	Miskin
21	6	66,667	94,583	82,968	Miskin	Miskin	Miskin
22	5	80,000	101,644	89,162	Miskin	Miskin	Miskin
23	7	42,857	66,190	58,062	Miskin	Miskin	Miskin
24	6	83,333	196,597	172,454	Miskin	Miskin	Miskin
25	8	50,000	79,896	70,084	Miskin	Miskin	Miskin
26	5	80,000	159,000	139,474	Miskin	Miskin	Miskin
27	7	64,286	168,512	147,817	Miskin	Miskin	Miskin
28	5	80,000	120,400	105,614	Miskin	Miskin	Miskin
29	5	70,000	62,200	54,561	Miskin	Miskin	Miskin
30	8	56,250	27,396	24,031	Miskin	Miskin	Miskin
31	3	150,000	174,167	152,778	Miskin	Miskin	Miskin
32	6	66,667	50,000	43,860	Miskin	Miskin	Miskin
33	8	50,000	51,813	45,450	Miskin	Miskin	Miskin
34	4	125,000	263,750	231,360	Miskin	Tidak Miskin	Tidak Miskin
35	4	100,000	149,278	130,945	Miskin	Miskin	Miskin
36	6	50,000	58,667	51,462	Miskin	Miskin	Miskin
Rata-rata	6	80,451	130,185	114,198			

Lampiran 7. Hasil Output Uji t-Statistik setelah intervensi program PUAP menggunakan Program SPSS versi 17.

1. Pengujian beda rata-rata pendapatan perkapita perbulan nominal sebelum dan setelah PUAP pada kelompok aksi

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum_PUAP - Setelah_PUAP	-62652.600	66049.479	13209.896	-89916.485	-35388.715	-4.743	24	.000

2. Pengujian pendapatan perkapita perbulan riil sebelum dan setelah PUAP pada kelompok aksi

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum_PUAP - Sesudah_PUAP	-44897.480	57458.521	11491.704	-68615.192	-21179.768	-3.907	24	.001

3. Pengujian pendapatan perkapita perbulan nominal sebelum dan setelah PUAP pada kelompok kontrol

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum_PUAP - Setelah_PUAP	-49734.028	56593.068	9432.178	-68882.367	-30585.688	-5.273	35	.000

4. Pengujian pendapatan perkapita perbulan riil sebelum dan setelah PUAP pada kelompok kontrol

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum_PUAP - Setelah_PUAP	-33746.306	47640.145	7940.024	-49865.412	-17627.199	-4.250	35	.000

5. Pengujian pendapatan perkapita perbulan nominal setelah PUAP antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Pendapatan_Perkapita	Equal variances assumed	.017	.896	.732	59	.467	14390.968	19658.372	-24945.344	53727.279
	Equal variances not assumed			.743	54.296	.461	14390.968	19375.474	-24449.668	53231.603

6. Pengujian pendapatan perkapita riil perbulan setelah PUAP antara kelompok aksi dengan kelompok kontrol

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
Pendapatan_Perkapita	Equal variances assumed	.017	.896	.732	59	.467	12623.570	17244.205	-21882.005	47129.145
	Equal variances not assumed			.743	54.296	.461	12623.570	16996.048	-21447.200	46694.340

